

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
NUR SEMESTA INDAH KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

Nahdiyatul Muhimah

NIM : 201105010019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
NUR SEMESTA INDAH KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Nahdiyatul Muhimah  
NIM : 201105010019  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
NUR SEMESTA INDAH KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Nahdiyatul Muhimah  
201105010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Oleh Pembimbing

  
**Ana Pratiwi, SE., Ak.,MSA.**  
**NIP. 198809232019032003**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT NUR SEMESTA INDAH KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 13 Desember 2023**

**Tim Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. H. Munir Is'adi, SE., M.M.  
NIP. 197506052011011002

Muhammad Fauzudin Faiz, M.H.I  
NIP. 199108042023211023

Anggota :

1. Dr. Fauzan S.Pd., M.Si

(  )

2. Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

الَّذِينَ إِذَا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقُّوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ ۖ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (QS. Al-Hajj 41)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>“Tafsir Qur’an”, Al-Hajj Ayat 4, Diakses pada Desember 14, 2023.  
<https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-41>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Maskuri dan Ibu Nur Kasanah yang telah membesarkanku, menyayangiku dan yang telah mengusahakan yang terbaik hingga saat ini. Terimakasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan untuk anakmu dan terimakasih telah mendukungku untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
2. Adik saya, Muhammad Takhsin Ibadi yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama.
3. Segenap guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu kepada saya.
4. Sahabat-sahabat dekat saya yang selalu memberi dukungan. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa beryukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER).

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata (S1) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh intelektual ini.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah dan dosen pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., CCRP., CCGS selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait akademik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.





## ABSTRAK

**Nahdiyatul Muhimah, Ana Pratiwi, 2023:** Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.

*Good Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan memantau proses pengendalian suatu bisnis atau perusahaan untuk memberikan nilai tambah, serta bentuk kepedulian terhadap pemangku kepentingan, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember? (3) Apa dampak implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember (3) Untuk mengetahui dampak implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yang berarti penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah telah menjalankan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik secara internal maupun eksternal melalui 5 pilar utama yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan fairness*. (2) Untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat implementasi *Good Corporate Governance* dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan mendetail terkait informasi yang dibutuhkan nasabah, melakukan survei, melihat *cashflow* nasabah, serta melakukan perundingan dengan dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan *shareholder* lainnya. (3) Menurut *Forum For Corporate Governance* di Indonesia, *Good Corporate Governance* mempunyai sejumlah dampak positif bagi perusahaan diantaranya kepercayaan masyarakat dan kinerja karyawan semakin meningkat, produktivitas Bank meningkat, Bank dapat mengambil keputusan secara mandiri, serta memberikan kepuasan pada pegawai maupun nasabah karena Bank memperhatikan kepentingan semua orang.

**Kata Kunci:** Prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Perkreditan Rakyat

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40

C. Subyek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	51
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
Lampiran-lampiran	
1. Matriks	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
9. Surat Selesai Bimbingan	
10. Biodata	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu.....	20
4.1	Tabel Struktur Organisasi .....	53



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Letak Geografis Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah.....	52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sektor perbankan Indonesia benar-benar berkembang selama satu dekade terakhir dan menjadi acuan keberhasilan perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara yang kegiatan usahanya tergantung modal dan kepercayaan dari masyarakat. Selama menjalankan aktivitasnya Bank menghadapi berbagai jenis risiko dalam kegiatan usahanya, seperti risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Terdapat banyak peraturan dalam industri perbankan yang membantu melindungi kepentingan masyarakat. Diantaranya adalah peraturan penyesuaian kewajiban pemenuhan modal yang batas minimalnya ditentukan oleh masing-masing Bank. Hal ini menjadikan perbankan sebagai sebuah industri yang *high legal* atau mempunyai sifat hukum yang tinggi dikarenakan memiliki sistem kebijakan yang ketat.<sup>2</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang kegiatan operasionalnya tidak menyediakan jasa pembayaran. Operasional BPR lebih dibatasi dibandingkan Bank Umum, karena BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, menukarkan mata uang asing, atau melakukan asuransi. Karena lokasinya seringkali dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan uang, keberadaan BPR dilihat dari

---

<sup>2</sup> Wahyu Indri Astuti, "Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 1.

kelebihannya bagi pemerintah yaitu meliputi fungsi memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang kesulitan atau tidak mampu mengakses Bank umum dan membantu pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat untuk segera mempercepat pembangunan di sektor perdesaan sekaligus mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat lembaga keuangan. Bank Perkreditan Rakyat seperti halnya Bank Umum dapat beroperasi secara konvensional atau prinsip syariah. Kegiatan operasional yang diperbolehkan yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan meliputi deposito tetap, tabungan, fasilitas kredit, pinjaman dan penyertaan dana pada Sertifikat Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Di Indonesia, isu terkait *Good Corporate Governance* (GCG) telah berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini terjadi sebagai respon terhadap banyaknya kebangkrutan perusahaan sebagai hasil dari manajemen perusahaan yang buruk. Dalam sepuluh tahun terakhir istilah GCG semakin dikenal oleh dunia usaha dan masyarakat. Istilah ini tidak hanya terkenal tetapi juga memegang posisi terhormat. Pertama, penerapan GCG menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas yang mampu memenangkan adanya persaingan bisnis global. Kedua, kegagalan penerapan GCG yang menyebabkan krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Pada bulan Januari 2004 Pedoman GCG sektor perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional. Industri perbankan merupakan industri yang diatur secara

---

<sup>3</sup> Sumartik, Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 26-27.

ketat yang mengandalkan modal dan kepercayaan masyarakat. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan dunia perbankan Indonesia setelah krisis perbankan tahun 1997, dibutuhkan banyak upaya termasuk penerapan GCG yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah diterbitkan pedoman terkait GCG pada Perbankan Indonesia, yang melengkapi pedoman umum GCG pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah. Sebagai industri dengan sistem manajemen yang ketat, Peraturan Undang-Undang berperan sangat penting. Oleh sebab itu, pedoman operasional GCG Perbankan Indonesia juga mengatur tentang fungsi *Compliance Office* atau kepatuhan dalam Bank.<sup>4</sup>

Laili menjelaskan bahwa dalam dunia perbankan, prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan BSI KCP Lumajang. Hal ini dikarenakan Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatannya mengikuti SOP. Terkait laporan keuangan contohnya adalah keterbukaan. Pihak Bank terbuka mengenai kondisi keuangan KCP, pihak Bank setiap hari menginput laporan transaksi ke dalam sistem. Oleh karena itu, arus kas yang masuk dan keluar setiap harinya dapat terpantau langsung oleh pihak Bank. Namun keterbukaanya bukanlah untuk publik melainkan untuk penilaian internal terhadap kinerja perusahaan. Kemudian setelah semua data terkumpul, semuanya diimpor ke data BSI pusat untuk pelaporan keuangan yang tersedia untuk publik. Dalam mencari nasabah, pihak

---

<sup>4</sup>Dedi Kusmayadi, Dedi Rusdiana, Dadang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 105.



Bank BSI juga menerapkan nilai-nilai jujur dan beretika saat berkomunikasi langsung terhadap nasabah yang datang. Hal tersebut sesuai dengan nilai penerapan transparansi dalam GCG. Dalam melayani nasabah Bank BSI juga menjelaskan produk secara detail berdasarkan kebutuhan finansial nasabah serta informasi terkait produk dana yang ada. Dengan memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk-produk layanan yang tersedia, Bank BSI menjelaskan secara detail syarat dan ketentuan produk-produk tersebut berdasarkan ketentuan syariah.<sup>5</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hazin di BPRS Bhakti Sumekar menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Bank BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan prinsip GCG. Hal ini sesuai dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan keuangan yang diatur dalam SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2016. Prinsip GCG penting untuk di terapkan demi keberlangsungan Bank tersebut, termasuk Bank yang sehat ataupun tidak. Selain itu, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG juga merupakan bentuk penjelasan kepada masyarakat yang menitikpkan modalnya pada Bank bahwa Bank tersebut dikelola secara baik dan efektif. Implementasi prinsip GCG berperan penting bagi kegiatan operasional perusahaan dalam menciptakan keterbukaan, akuntabel, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan bagi *stakeholders*. Contoh implementasi prinsip GCG di BPRS Bhakti Sumekar adalah terbuka mengenai kondisi keuangan dan non keuangan disana. Terkait hal ini BPRS Bhakti Sumekar menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

---

<sup>5</sup> Nur Laili Az Zahro, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang" (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2018), 60-70.

setahun sekali dan kemudian mempublikasikannya melalui *website* dan menempelkannya pada dinding laporan keuangan sehingga pihak yang ingin mengetahui terkait laporan keuangan dapat dengan mudah mengaksesnya melalui *website*. Penerapan prinsip GCG pada Bank BPRS Bhakti Sumekar menyesuaikan pada kebutuhan dan kebijakan yang telah pemerintah tetapkan. Meskipun penerapan prinsip GCG belum sepenuhnya optimal, namun penerapannya terus dilakukan tahap demi tahap demi kemajuan perusahaan. Pada saat ini prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan kemandirian sudah diterapkan cukup baik. Sementara itu meskipun prinsip akuntabilitas dan keadilan telah diterapkan, namun masih perlu penyempurnaan lagi untuk ke depannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 penerapan GCG pada Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, didalamnya disebutkan bahwa Bank Umum diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya, terutama perumusan visi dan misi, perencanaan strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah pengendalian internal diseluruh tingkat yang ada. GCG merupakan kumpulan sistem pengaturan, pengendalian, serta pemantauan suatu usaha yang bertujuan meningkatkan *add value* dan merupakan wujud kepedulian terhadap pemangku kepentingan, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan pengelolaan yang transparan, bersih, dan profesional. dalam GCG terdapat 5 prinsip yaitu adanya

---

<sup>6</sup>Ahmad Hazin, "Penerapan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 58.

keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).<sup>7</sup>

Dalam penerapannya, GCG memerlukan proses yang panjang sehingga memerlukan komitmen, kerjasama, dan dukungan dari berbagai sektor masyarakat. Meskipun saat ini telah terdapat Undang-Undang perseroan terbatas untuk mendukung penerapan GCG, namun masih dibutuhkan berbagai hal lainnya di luar peraturan-peraturan tersebut agar terciptanya GCG. GCG merupakan prinsip universal, oleh karena itu GCG menjadi acuan bagi seluruh umat beragama dalam budaya diseluruh dunia. Yang membedakan praktik GCG di suatu negara dengan negara lain adalah GCG sebagai suatu sistem, karena keberadaan GCG menyesuaikan dengan sistem hukum yang sudah ada pada tiap negara, kondisi, kemajuan, dan budaya negara itu sendiri. Untuk menerapkan GCG dengan baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda tergantung situasi dan waktu.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, alasan penulis memilih BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember adalah karena pada BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember sudah menerapkan prinsip GCG dengan baik sesuai kewajiban Bank Umum menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh kegiatan usahanya. Terutama aspek tanggung jawab seluruh karyawan sudah memenuhi tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sangat baik. Selain itu dari segi laporan pelaksanaan GCG telah disusun dengan format yang baik

---

<sup>7</sup> Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance* (Malang: UNISMA Press, 2021), 105.

<sup>8</sup> Edi Wibowo, "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (Surakarta 2020): 135.

dan lengkap serta mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?
3. Apa dampak implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Khususnya mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance*, serta bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga menambah pengetahuan terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan untuk referensi penelitian selanjutnya.

### b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dalam bidang tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

### c. Bagi penulis

Dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan merupakan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

### d. Bagi Peneliti berikutnya

Sebagai tambahan referensi bagi rekan-rekan yang membutuhkan sumber data untuk melakukan penelitian dengan topik ataupun objek penelitian yang sama.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perluasan pembahasan yang semakin meningkat, definisi istilah mencantumkan arti istilah dalam judul penelitian:

### 1. Implementasi

Grindle berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses umum tindakan pengelolaan yang dapat dipelajari pada suatu tingkatan tertentu. Selain itu dalam bukunya Tahir Horn menyatakan bahwa implementasi mengacu pada suatu tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, pemerintah atau badan swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, pengertian implementasi adalah proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang dilaksanakan sehubungan dengan suatu organisasi atau lembaga, khususnya instansi pemerintah, serta sarana dan prasarana yang mendukung program yang dilaksanakan.<sup>9</sup>

### 2. *Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* (GCG) mengacu pada sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>10</sup> Menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI), GCG diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus

---

<sup>9</sup>Thomas S Kaihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (Surabaya: 2016): 1.

<sup>10</sup>Indrayan Pranata, “Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan (Studi pada PT. JBA Indonesia Cabang Tipar Cakung Periode 2109)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (Jakarta: 2019): 2.

perusahaan, kreditur, pegawai negeri, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya mengenai hak dan kewajibannya. Tujuan GCG adalah menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.<sup>11</sup>

### 3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pembayaran. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember yang terdiri 5 bab, yaitu:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini merupakan landasan kajian dan berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang sedang diteliti. Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka.** Bab ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan juga mencakup kajian-kajian teoritis.

---

<sup>11</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Grup, 2014), 31.

<sup>12</sup> Wahyu Muh. Syata, Murni Nia, Muhammad Ilham, *Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 50.

**Bab III Metode Penelitian.** Bab ini berisi menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

**Bab IV Penyajian Data dan Analisis data.** Bab ini memuat rumusan masalah penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

**Bab V Penutup.** Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat menjadi bukti untuk mendukung argumentasi teoritis yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu antara lain skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dengan mengambil langkah ini akan membantu mengetahui orisinilitas dan seberapa pentingnya penelitian yang akan dilakukan.

1. Listya Yusuf (2019) dikutip dari skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. BNI Syariah".

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011-2017 di BNI Syariah pada aspek keterbukaan, tanggung jawab, dan kesetaraan tidak berpengaruh terhadap ROE dan ROA. Sedangkan aspek akuntabilitas dan independensi di BNI Syariah tahun 2011-2017 memberikan dampak positif terhadap ROE dan ROA. Terkait aspek Independensi, BNI Syariah memiliki nilai rata-rata yang tinggi sehingga berpengaruh signifikan terhadap nilai GCG dan membuat kinerja keuangan meningkat. Salah satu yang dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu Bank melalui penerapan prinsip GCG dengan baik adalah ROA dan ROE.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 73.

Hal ini menjadi tolak ukur bagi BNI Syariah untuk terus menjaga dan mempertahankan perbaikan demi keberlangsungan Bank. Namun dari sisi kemandirian dan tanggung jawab, BNI Syariah mempengaruhi nilai GCG secara keseluruhan karena nilai rata-ratanya yang lebih rendah dari nilai maksimalnya. Artinya, tanggung jawab Bank masih rendah sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan terfokus pada aspek ini.<sup>14</sup>

2. Nur Laili Az-Zahro (2019) dikutip dari skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa implementasi GCG telah diterapkan secara bertahap di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang demi kemajuan perusahaan. Namun hal ini beberapa pegawai belum memahami istilah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. Oleh karena itu, peneliti menggunakan istilah lain yang lebih sederhana dan mudah dipahami seperti keterbukaan, kewenangan yang jelas, tanggung jawab, objektif, kewajaran dan kesetaraan serta patuh pada peraturan DSN MUI.<sup>15</sup>

3. Elisa Alfi Priyandini (2019) dikutip dari skripsi yang berjudul "Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo".

---

<sup>14</sup> Listya Yusuf, "Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada BNI Syariah" (Skripsi, UIN Ar Raniry, 2019), 92-93.

<sup>15</sup> Nur Laili Az-Zahro, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 69.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung Jawab, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan telah diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo. Namun berdasarkan prinsip tanggung jawab, masih banyak karyawan yang terlihat lalai saat menunaikan pekerjaannya sehingga penerapan prinsip tanggung jawab belum maksimal.<sup>16</sup>

4. Agustina Eka Harjanti (2019) dikutip dari jurnal yang berjudul “Evaluasi Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Bank Perkreditan Rakyat”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 telah diterapkan di BPR ABC dengan modal inti sebesar 3,1 Miliar. Namun Dewan Direksi belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>17</sup>

5. Sri Mulyani (2020) dikutip dari jurnal yang berjudul "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah".

---

<sup>16</sup> Elisa Alfi Priandini, “Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 70.

<sup>17</sup> Agustina Eka Harjanti, “Evaluasi Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (Kudus 2019): 58-59.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa di Indonesia Bank Umum Syariah (BUS) telah menerapkan GCG serta memiliki reputasi yang baik. Bank yang mendapat predikat baik ini adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Panin Syariah, Mega Syariah, dan Bukopin Syariah. Sementara itu, penerapan GCG di BCA Syariah mendapat nilai sangat baik.<sup>18</sup>

6. Visca Aries Tantia (2021) dikutip dari jurnal yang berjudul "Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretif untuk mengumpulkan data dan bertujuan mendapatkan gambaran secara utuh terkait penerapan GCG dilihat dari prinsip TARIF (*transparency, accountability, responsibility, indenpendency* dan *fairness*) pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG khususnya *transparency, accountability, responsibility, indenpendency, dan fairness* di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar semuanya telah mematuhi pedoman dasar pelaksanaannya.

---

<sup>18</sup> Sri Mulyani, "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Malang 2020): 22.

Prinsip keterbukaan yang dilakukan berdampak pada keterbukaan berbagai informasi tentang Bank Nagari Syariah terhadap masyarakat. Media yang digunakan oleh Bank Nagari Syariah meliputi media cetak, media sosial, dan media elektronik. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan mengarah pada pembagian tugas antar pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya. Prinsip *responsibility* yang diterapkan tercermin dari resiko yang harus ditanggung Bank apabila terjadi kelalaian dan harus memperhatikan segala sisi baik dan buruknya. Prinsip *indenpendency* yang diterapkan tercermin pada Bank Nagari Syariah yang selalu menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan untuk prinsip *fairness* yang diterapkan terlihat jelas bagi setiap karyawan yang mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>

7. Vika Ayusti (2021) dikutip dari jurnal yang berjudul "*Analisis Corporate Governance Pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah*".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada BPR Dana Mandiri Medan sudah baik terutama pertanggung jawabannya. Dalam mengelola dana kredit masyarakat BPR Dana Mandiri Medan mempunyai

---

<sup>19</sup> Fischa Aries Tantia, "Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batu Sangkar" (Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2021), 87-89.

tanggung jawab besar terhadap pengelolaan dana kredit masyarakat agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, kinerja perusahaan akan meningkat dengan adanya *Corporate governance* pada BPR Dana Mandiri Medan.<sup>20</sup>

8. Anis Tri Handayani (2022) dikutip dari skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat KC Bengkulu".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa implementasi GCG telah diterapkan di Bank Muamalat KC Bengkulu. Meski masih ada kendala dalam proses pelaksanaannya, namun masih bisa diselesaikan secara profesional dan demokratis. Kepatuhan GCG terhadap prinsip syariah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan teori dan kenyataan yang melandasinya guna menjaga dan mengembangkan kemajuan Bank Muamalat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.<sup>21</sup>

9. Ayu Ismah Azizah Kurinci (2022) dikutip dari skripsi yang berjudul "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang berguna sebagai landasan teori bagi ilmu

---

<sup>20</sup>Fika Yusti Harahap, "Analisis *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 4 no. 1 (Sumatera Utara 2021): 197.

<sup>21</sup>Anis Tri Handayani, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat KC Bengkulu" (Skripsi, UIN Fatwati Sukarno Bengkulu, 2022), 67.

pengetahuan dengan cara memilih dan menganalisis referensi yang sesuai dengan judul yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa di Bank Syariah, profitabilitas tidak terpengaruh oleh prinsip GCG. Hal tersebut dibuktikan dengan pengukuran *return on investment* (ROA). Adanya kontribusi GCG terhadap profitabilitas Perbankan Syariah dinilai masih kurang optimal karena dalam penerapannya prinsip-prinsip GCG masih jarang digunakan. Namun kualitas kinerja GCG berdampak negatif terhadap risiko pendanaan Bank Syariah yang diukur dengan kualitas aset (NPF). Hal ini disebabkan NPF Bank Syariah mengalami penurunan yang relatif signifikan sehingga risiko keuangan perusahaan meningkat dan kualitas aset Bank Syariah memburuk. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah singkatnya waktu penerapan GCG.<sup>22</sup>

10. Ni Luh Putu Katrin Edelwis, I Gde Ary Wirajaya (2022) dikutip dari jurnal yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada PT. BPR Kusemas Dana Mandiri”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini memaparkan hasil wawancara mendalam kepada partisipan penelitian untuk memberikan

---

<sup>22</sup>Ayu Ismah Azizah Kurinci, Dewi Tamora Siregar, Nurianti Rahmadhani, Juliana Nasution,” Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (Medan 2022): 1068.

gambaran jelas bagaimana prinsip *Good Governance* (GG) diterapkan di PT. BPR Kusemas Dana Mandiri.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar implementasi prinsip *Good Governance* (GG) di PT. BPR Kusemas Dana Mandiri dilaksanakan dengan baik. Diantaranya adalah penerapan prinsip transparansi yang diwujudkan dalam keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lainnya telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan OJK. Penerapan prinsip akuntabilitas ditunjukkan dari kejelasan setiap pegawai di perusahaan, pelaksanaan pembagian tugas dan kehadiran auditor eksternal yang memadai. Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab juga tercermin dalam tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Prinsip independensi juga ditunjukkan dalam menjamin informasi nasabah serta tenaga ahli tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip kesetaraan dan kewajaran diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat dan selalu mempertimbangkan kepentingan kolektif seluruh pemangku kepentingan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ni Luh Putu Katrin Edelwis, I Gde Ary Wirajaya, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada PT. BPR Kusemas Dana Mandiri", *Jurnal Akuntansi* 23, no. 1 ( Bali 2022): 40.



Tabel 2.1

**Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Listya Yusuf (2019)	Analisis Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. BNI Syariah	Keduanya membahas tentang prinsip GCG	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif
2.	Nur Laili Az-Zahro (2019)	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang	Keduanya membahas tentang prinsip-prinsip GCG dan menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian BPR
3.	Elisa Alfi Priyandini (2019)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo	Keduanya membahas tentang prinsip-prinsip GCG dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek penelitian BPR
4.	Agustina Eka Harjanti (2019)	Evaluasi Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank	Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian BPR	Penelitian sebelumnya menekankan terhadap evaluasi implementasi prinsip GCG. Sedangkan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Perkreditan Rakyat		peneliti saat ini menekankan terhadap prinsip GCG
5.	Sri Mulyani (2020)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Bank Umum Syariah	Keduanya membahas tentang prinsip-prinsip GCG	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah sedangkan objek penelitian peneliti BPR. Dan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif
6.	Visca Aries Tantia (2021)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batusangkar	Keduanya membahas terkait prinsip-prinsip GCG dengan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah. Sedangkan objek peneliti saat ini BPR
7.	Vika Ayusti (2021)	Analisis <i>Corporate Governance</i> pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah	Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian BPR	Penelitian sebelumnya menekankan pada prinsip GCG dalam meningkatkan nasabah. Sedangkan peneliti saat ini menekankan pada prinsip GCG
8.	Anis Tri Handayani (2022)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Muamalat	Keduanya membahas terkait prinsip-prinsip GCG dengan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah. Sedangkan objek peneliti saat ini BPR

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		KC Bengkulu		
9.	Ayu Ismah Azizah Kurinci (2022)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia	Keduanya membahas terkait prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek penelitian sebelumnya Bank Syariah. Sedangkan objek peneliti saat ini BPR
10.	Ni Luh Putu Katrin Edelwis, I Gde Ary Wirajaya (2022)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> pada PT. BPR Kusemas Dana Mandiri	Keduanya membahas terkait prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan objek penelitian BPR	Penelitian sebelumnya melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi. Sedangkan peneliti saat ini melakukan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, dokumentasi, buku-buku, jurnal, dan <i>website</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan hasil pemaparan yang disajikan pada tabel, penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu keduanya menganalisis mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* menurut Komite Cadbury adalah sebuah pedoman yang berfungsi memberikan arahan kepada suatu perusahaan untuk mewujudkan suatu keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam rangka pertanggung jawabannya terhadap *shareholders* dan juga *stakeholders*. Sedangkan *Good Corporate Governance* menurut OECD dan FCGI merupakan suatu aturan yang mendefinisikan hubungan mengenai hak dan kewajiban pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut sumber lain, *Good Corporate Governance* (GCG) ialah sebuah landasan yang dijadikan pedoman dalam peningkatan nilai saham dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang. Isi dari GCG sendiri tidak lain hanyalah permasalahan perusahaan yang secara umum mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta *responsibility*.<sup>24</sup>

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, hal ini merupakan bentuk proses dan struktur BUMN yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemegang

---

<sup>24</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 189.

saham dalam jangka panjang. Ini adalah bukti keberhasilan usaha dan tanggung jawab dari perusahaan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme kerja yang mengatur hubungan suatu perusahaan dengan para pemangku kepentingan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ini juga merupakan upaya untuk mengelola bisnisnya dengan baik dengan tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>25</sup>

## 2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

### a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dipahami oleh pihak lain. Keterbukaan informasi oleh perusahaan tidak hanya mencakup hal-hal yang sesuai dengan Undang-Undang, tetapi juga keputusan yang diambil oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi berarti perusahaan yang bersangkutan harus memberikan informasi yang terkini, lengkap, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pihak lain agar tidak menimbulkan kesenjangan antar pihak terkait. Informasi yang disampaikan tersebut juga harus transparan dan tidak terbatas

---

<sup>25</sup>Handrik Manossoh, *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 15-16.

pada visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, struktur dan kompensasi, pemegang saham, saham dewan Direksi dan pejabat eksekutif serta anggota keluarga dalam perusahaan. Selain itu, penerapan dan tingkat manajemen resiko, sistem pemantauan dan pengendalian internal, sistem GCG, dan kepatuhan juga dianggap penting.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas artinya suatu perusahaan mampu melaporkan kinerja secara terbuka dan wajar kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan harus dikelola secara baik dan terukur sesuai dengan kepentingan perusahaan serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi *stakeholders* dan *shareholders*.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus bisa memberikan *jobdesk* kepada setiap karyawannya secara jelas sesuai antara visi, misi, *corporate values*, dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga wajib meyakini bahwa setiap karyawan didalam perusahaan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diemban, bentuk tanggung jawab, dan peran yang dijalankan pada penerapan GCG. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki sistem pengendalian intern yang dinilai efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan juga harus memiliki tingkatan kerja yang berlaku bagi seluruh karyawannya secara konsisten dan sesuai dengan tujuan

perusahaan, serta mempunyai sistem penghargaan dan peringatan. Setiap instansi dalam perusahaan dan seluruh pegawai wajib mematuhi prinsip etika bisnis dan kode etik yang telah disepakati perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip *responsibilitas* ini berarti bahwa perusahaan harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan secara berkelanjutan dan dapat diakui dalam jangka panjang. Saat menerapkannya, perusahaan harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan Undang-Undang, anggaran dasar dan peraturan perusahaan yang ada dan ditetapkan. Bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dipenuhi oleh perusahaan antara lain kepedulian terhadap masyarakat lokal dan menjaga lingkungan sekitar perusahaan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan tepat.

d. *Independensi (Independency)*

Prinsip *independensi* artinya suatu perusahaan harus dikelola secara mandiri agar pegawai-pegawai dalam perusahaan tidak saling terpengaruh atau diintervensi oleh pihak lain. Dalam pengambilan keputusan setiap anggota perusahaan dilakukan seobjektif mungkin, tidak dipengaruhi pihak manapun, tidak dipengaruhi kepentingan apapun, dan tidak ditekan. Pada titik ini, setiap jabatan dalam

perusahaan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi yang berlaku sesuai lingkup tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak boleh saling mengganggu.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan mengandung arti bahwa perusahaan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Saat menerapkan prinsip tersebut, perusahaan harus mau menerima masukan dan pendapat dari para pemegang kepentingan untuk kepentingan perusahaan dan memberikan akses informasi kepada seluruh pemegang kepentingan.<sup>26</sup>

3. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan GCG yakni menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut merupakan pemangku kepentingan internal yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Pihak eksternal saat ini meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Secara khusus tujuan GCG meliputi :

- a. Membantu menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan organisasi serta mengatasi tantangan organisasi di masa depan.

---

<sup>26</sup>Handrik Manossoh, *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 23-27.



- b. Meningkatkan legitimasi (pengakuan orang lain) terhadap organisasi yang dikelola secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
- c. Hak dan kewajiban pemegang saham dan *stakeholders*.

Pencapaian GCG memerlukan dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dapat dicapai dengan menyajikan informasi mengenai tinjauan kinerja, sumber daya perusahaan, seluruh transaksi dan kejadian internal, serta keputusan manajemen internal lainnya. Disisi lain, keseimbangan eksternal dapat dicapai dengan menyajikan informasi bisnis kepada pemangku kepentingan khususnya pemegang saham, kreditur, dan Bank.<sup>27</sup>

#### 4. Kerangka *Good Corporate Governnace*

Menurut Terry dalam bukunya Prinsip Manajemen mengatakan bahwa fungsi tata kelola antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan, mengendalikan.<sup>28</sup>

##### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) dalam suatu organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum bergerak untuk mencapai tujuan, maka ada perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan dalam suatu institusi sangatlah penting, karena pada kenyataannya. Perencanaan memegang peranan penting dibandingkan fungsi lainnya. Perencanaan

---

<sup>27</sup>Handrik Manossoh, *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 21-22.

berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas di antara orang-orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Karena tugas-tugas tersebut sangat banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka tugas-tugas tersebut dibagi-bagi untuk dilaksanakan oleh masing-masing anggota organisasi.

c. Koordinasi

Koordinasi mengandung arti menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi tidak dilaksanakan menurut kehendak pelakunya, melainkan menurut kaidah-kaidah sehingga turut menunjang tercapainya tujuan.

d. Pengendalian atau pengawasan

Pengendalian atau pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi governance. Fungsi pemerintahan yang dikuasai adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam organisasi merupakan akibat dari lemahnya pengendalian sehingga terjadi berbagai penyimpangan antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Fauzan, Hadi Prayitno A dkk, "Tata Kelola Pesantren Salafiyah pada PT Perspektif Kepemimpinan Nabi", *Jurnal Internasional Seni, Humaniora & Ilmu Sosial* 3, no. 1 (Jember 2022): 59-60.

## 5. Dampak dan manfaat *Good Corporate Governance*

Dampak GCG antara lain:

- a. Mempermudah menarik lebih banyak modal dari investor dan kreditur.
- b. Mengurangi biaya modal.
- c. Mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Dapat mempengaruhi harga saham untuk masa depan yang lebih baik.
- e. Meminimalisir biaya *agency cost*.
- f. Meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat.

Adapun manfaat GCG antara lain:

- a. Kelangsungan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.
- c. Menjaga keberlangsungan perusahaan (*going concern*).
- d. Mampu mengukur sasaran kinerja perusahaan.
- e. Meningkatkan produktivitas seluruh karyawan.
- f. Mengurangi distorsi.<sup>30</sup>

## 6. Faktor-faktor implementasi *Good Corporate Governance*

Dalam implementasi prinsip GCG terdapat dua faktor yang mempengaruhi diantaranya :

- a. Faktor Eksternal
  - 1) Terdapat sistem hukum yang berkembang dengan baik.
  - 2) Penerapan GCG mendapat dukungan dari lembaga publik dan instansi pemerintah.

---

<sup>30</sup> Danri Toni Siboro, "Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan pengungkapan Laporan Keuangan", *Jurnal Fokus Ekonomi* 2, no. 2 (Medan 2007): 22-23.

- 3) Terdapat contoh penerapan GCG yang baik sehingga GCG dapat menjadi contoh.
- 4) Membangun nilai-nilai sosial untuk mendukung penerapan GCG di lingkungan sosial.
- 5) Menumbuhkan semangat antikorupsi dan mengevaluasi kualitas pendidikan dan kesempatan kerja.

b. Faktor Internal

- 1) Memiliki budaya yang mendukung penerapan GCG.
- 2) Terdapat peraturan dan pedoman yang mengatur penerapan nilai-nilai GCG.
- 3) Pengendalian manajemen risiko perusahaan saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip GCG.
- 4) Terdapat sistem hasil audit (pemeriksaan) yang efektif pada perusahaan.
- 5) Adanya pemberian informasi yang terbuka kepada masyarakat.<sup>31</sup>

7. Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep GCG mencakup pengembangan di dua bidang yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bersifat teknis dan melibatkan perubahan pada struktur dan sistem organisasi. Sedangkan perangkat lunak melibatkan perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*value*), sikap (*attitudes*), dan etika perilaku (*ethics of action*).

---

<sup>31</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Dadang Badruzzaman, *Good Corporate Governance*, 16-17.

Dalam dunia bisnis, sebagian besar perusahaan biasanya lebih memperhatikan aspek perangkat keras, seperti menetapkan sistem dan prosedur serta merancang struktur organisasi. Hal ini sangat wajar, karena aspek perangkat keras membuat implementasi lebih mudah, lebih cepat untuk diverifikasi, dan hasilnya lebih cepat dibandingkan aspek perangkat lunak.

Berdasarkan pendekatan tujuh Model Mc Kinsey, landasan pembentukan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik antara lain sebagai berikut:

a. Aspek keras

- 1) Strategi, ialah rencana organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Struktur, ialah cara segala sesuatu berhubungan satu sama lain.
- 3) Sistem, ialah mekanisme bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Aspek lunak

- 1) Kecakapan, ialah suatu kemampuan untuk mengembangkan kapabilitas suatu perusahaan.
- 2) Gaya kepemimpinan, ialah penunjang tercapainya tujuan organisasi.
- 3) Staf, ialah kemampuan untuk berkolaborasi antara manajemen dengan departemen lainnya.

4) Nilai-nilai bersama, ialah nilai-nilai para pemangku kepentingan perusahaan yang membentuk perilaku anggota organisasi.<sup>32</sup>

8. *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*)

Pada bulan Januari 2004, Komite Nasional mengeluarkan Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Industri perbankan merupakan industri yang diatur secara ketat yang operasionalnya bergantung pada permodalan dan kepercayaan masyarakat. Banyak upaya yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia pasca krisis perbankan tahun 1997, diantaranya adalah penerapan GCG yang baik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pedoman GCG Perbankan Indonesia diterbitkan dan diterapkan yang dijalankan berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang merupakan pelengkap dari Pedoman Umum GCG.

Sebagai sebuah industri dengan *highly regulated*, ketaatan terhadap Peraturan Undang-Undang merupakan hal yang cukup penting. Khusus bagi Bank yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa dan Syariah Islam dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, Pedoman GCG Bank Indonesia mengatur peran terhadap kepatuhan di Bank.

---

<sup>32</sup> Muh. Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 3-4.

Saat penerapan GCG, Bank perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan situasi dan kondisi Bank sehingga dapat memastikan penerapan GCG berjalan lancar dan didukung oleh seluruh *stakeholders*. Pedoman GCG Perbankan Indonesia menjelaskan bahwa penerapan GCG memerlukan keterlibatan seluruh tingkatan organisasi. Implementasinya dapat dimulai dengan menetapkan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dihormati oleh semua pihak. Bagi perbankan di Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik dapat dicapai melalui perkataan dan tindakan. Hal ini merupakan elemen kunci yang mendasari penerapan GCG. Pedoman GCG Perbankan Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penerapan GCG dapat dicapai melalui lima tindakan, yaitu:
  - a) Identifikasi visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
  - b) Penetapan struktur tata kelola perusahaan.
  - c) Penetapan budaya perusahaan.
  - d) Penetapan sarana keterbukaan informasi publik.
  - e) Penyempurnaan berbagai kebijakan perbankan untuk memenuhi prinsip GCG.
- 2) Menetapkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan merupakan langkah awal dalam penerapan GCG pada suatu bank. Struktur tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan secara bertahap yang terdiri dari:
  - a) Kebijakan tata kelola perusahaan termasuk tekad untuk melaksanakan GCG dan prinsipnya yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan.

- b) Kode etik, termasuk ketidakberpihakan dan kepercayaan dari pimpinan dan karyawan Bank.
  - c) Tata Tertib Dewan Komisaris dan Kerja Direksi. Hal ini mencakup hak, kewajiban serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan para anggotanya.
  - d) Organisasi termasuk manajemen resiko (*risk management*), pengendalian internal, dan kepatuhan.
  - e) Membangun budaya perusahaan yang memfasilitasi realisasi visi dan misi serta penerapan struktur tata kelola perusahaan. Budaya perusahaan diciptakan dengan menetapkan prinsip dasar serta nilai dan standar yang disepakati dan diterapkan secara konsisten.
- 3) Pembentukan pola pengungkapan dan tujuan. Sarana pengungkapan terdapat pada laporan tahunan, *website*, dan evaluasi penerapan GCG.<sup>33</sup>
9. *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meliputi :

- a. Penerapan tata kelola sangat penting karena BPR harus menghadapi tantangan dan risiko internal dan eksternal yang jumlahnya semakin besar dan kompleks.
- b. BPR yang besar yang didalamnya terdapat struktur usaha dan volume usaha yang besar hendaknya menerapkan tata kelola secara utuh

---

<sup>33</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Dadang Badruzzaman, *Good Corporate Governance*, 105-107.



khususnya mengenai kepatuhan dan integritas struktur organisasi. Namun bagi BPR skala kecil, penerapan tata kelola yang baik diutamakan pada fungsi tata kelola tersebut.

- c. Bagi Komisaris dan Anggota Komite tidak boleh mempunyai benturan kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalani masa tunggu sebelum menjadi Komisaris maupun anggota Komite.
- d. Untuk mendukung penerapan tata kelola, pemegang saham BPR dapat menunjuk seseorang sebagai wakilnya yang berguna dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di BPR.
- e. BPR mewajibkan penerapan tata kelola pada seluruh tingkatan dalam seluruh kegiatannya.<sup>34</sup>

#### 10. Tahap-tahap penerapan prinsip *Good Corporate Governance*

Proses penerapan GCG memerlukan beberapa langkah tergantung pada analisis situasi, konteks perusahaan dan tingkat kesiapannya untuk memastikan penerapan GCG dapat berjalan lancar dan seluruh komponen perusahaan mendukung. Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Tahap Persiapan

Fase ini mencakup 3 langkah utama yaitu *awareness building* (peningkatan kesadaran), *GCG assessment* (evaluasi GCG, dan *GCG manual building* (pengembangan GCG secara manual).

---

<sup>34</sup> Muh. Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, 10-11.

*Awareness building* merupakan langkah awal dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya GCG. Upaya ini terwujud berkat bantuan para tenaga ahli diluar perusahaan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa seminar, *workshop*, diskusi kelompok, dan lain-lain. *GCG Assessment* merupakan upaya untuk mengukur keadaan suatu perusahaan saat ini untuk menentukan GCG-nya. Langkah ini dirancang untuk memastikan titik awal penerapan GCG dan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan untuk mendukung penerapan GCG agar dapat diterapkan secara efektif. *GCG assessment* ini diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. *GCG manual building* merupakan langkah selanjutnya setelah *GCG assessment*.

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan menentukan implementasi mana yang diprioritaskan, maka dapat disusun pedoman penerapan GCG yang baru. Penyusunan manual dapat dibuat dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan, sehingga memungkinkan untuk membedakan antara buku pedoman yang diperuntukkan bagi badan hukum dan buku pedoman yang diperuntukkan bagi seluruh anggota dalam perusahaan.

## b. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan membuat GCG manual, langkah selanjutnya adalah mulai menerapkannya secara internal. Tahap implementasi ini terdiri dari 3 tahap utama yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Sosialisasi, diwajibkan menjelaskan seluruh aspek terkait penerapan GCG pada perusahaan. Upaya sosialisasi ini harus dilakukan dibawah pengawasan langsung dari kelompok yang dibentuk khusus dan dengan diawasi secara langsung oleh direktur utama yang ditunjuk perusahaan.
- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang dikembangkan. Penerapannya merupakan *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan.
- 3) Internalisasi, yaitu tahap implementasi jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya penerapan GCG ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan yang beroperasi, serta berbagai peraturannya.

## c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan langkah yang dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan GCG yang dicapai melalui *scoring*. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Secara wajib penilaian dalam bentuk *assessment*, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan pada lingkungan

---

<sup>35</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiansa, Dadang Badruzzaman, *Good Corporate Governance*, 131-133.

BUMN. Evaluasi tersebut membantu perusahaan memantau kondisi, situasi, dan kinerja penerapan GCG serta perbaikan yang diperlukan memungkinkan perusahaan melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi perusahaan.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiansa, Dadang Badruzzaman, *Good Corporate Governance*, 131-133.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman merupakan metode penelitian yang didalamnya berisi penjelasan deskriptif. Penjelasan deskriptif adalah penjelasan yang memuat uraian tentang peristiwa, fenomena, gejala, atau perkembangan yang sedang terjadi.

Peneliti kemudian mengabadikan kejadian tersebut yang akan dijelaskan lebih detail nanti. Dalam penelitian kualitatif, data yang ditemukan tidak dikumpulkan melalui prosedur secara statistik. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada sifat fenomena yang akan diteliti. Hasil analisis penelitian kualitatif juga bersifat konstruktif, mengembangkan dan menggali terori-teori sosial lain yang ada di masyarakat.<sup>37</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti adalah Bank yang bergerak di bidang Lembaga Perkreditan Rakyat, yang seringkali identik dengan penyediaan pembiayaan. Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember yang lokasinya terletak di Jln. Ahmad Yani Lingkungan No.86, Sumberdandang, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi di Bank tersebut karena peneliti ingin

---

<sup>37</sup>Agustina Eka Harjanti, "Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat", *Journal Of Management & Business* 2, no. 2 (Semarang 2019): 53.

mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bank tersebut khususnya kelima prinsip yang menjadi bagian dari *Good Corporate Governance*.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian mencakup jenis dan sumber informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Penggambaran tersebut memuat informasi yang diperoleh, subjek penelitian, dan cara memastikan informasi yang diperoleh dapat dibuktikan. Menurut Tatang M. Amirin, subyek penelitian adalah sumber dimana peneliti memperoleh informasi tersebut kemudian keterangan tersebut dimasukkan dalam analisis dan hasil penelitian.<sup>38</sup>

*Purposive sampling* merupakan suatu prosedur pemeriksaan terhadap informan yang ingin diwawancarai dengan adanya suatu pertimbangan tertentu, contohnya seseorang yang dianggap lebih memahami terkait apa yang hendak ditanyakan peneliti. Oleh karena itu, pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak melainkan terstruktur. Pengambilan sampel didasarkan pada penilaian peneliti dan perusahaan terhadap siapa saja yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel wawancara. Pengambilan sampel tersebut diharuskan seseorang yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang baik untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu yang diinginkan peneliti. Diharapkan dengan teknik *purposive* tersebut bisa membantu peneliti mengetahui bagaimana penerapan

---

<sup>38</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 51.

prinsip-prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.<sup>39</sup>

Pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini antara lain:

1. Bapak Marwan Usman Nadhy sebagai Pimpinan .
2. Ibu Selusi Ernawati sebagai Kasie. Operasional.
3. Ibu Rike Wijayanti sebagai *Accounting*.
4. Ibu Yanti sebagai Admin.
5. Ibu Murti Handayani sebagai Admin.
6. Ibu Vida Arfitasari sebagai Teller.
7. Bapak Irwan sebagai nasabah.
8. Ibu Mida sebagai nasabah.
9. Bapak Noli sebagai nasabah.
10. Bapak Yanto sebagai nasabah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan bagian terpenting dari penelitian. Oleh karena itu, saat pengumpulan data perlu mempertimbangkan keefektifan dan kesesuaian teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan atau menggali informasi dari informan.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni teknik triangulasi. Artinya, saat mengumpulkan data peneliti menggunakan 3 cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik triangulasi sumber. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari sumber-

---

<sup>39</sup> Ahmad Fauzy, *Metode Sampling* (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 25.

sumber lain seperti buku, skripsi, jurnal, *website*, dan lain sebagainya. Teknik triangulasi menurut *Institute of Golbal Tech* adalah suatu teknik yang cara kerjanya mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada sebelumnya untuk memperkuat dan menyempurnakan data yang diperoleh.<sup>40</sup>

### 1. Observasi

Observasi dapat dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan atau datang ke tempat lokasi penelitian.<sup>41</sup> Data yang diperoleh melalui observasi dapat berupa fakta-fakta yang kemudian dapat dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mencermati fenomena dan mendeskripsikan seluruh data yang didapatkan. Adapun data yang didapatkan melalui observasi, diantaranya:

- a. Bank BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
- b. Gambaran dan kondisi umum di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
- c. Pengamatan langsung terkait implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.

### 2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara saat penelitian berguna untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang ingin digali oleh peneliti, hal ini

---

<sup>40</sup> Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (Surabaya 2010): 55.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 226.



merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.<sup>42</sup> Metode ini dinilai cocok menjadi jembatan antara peneliti dan informan untuk mengetahui secara pasti mengenai informasi yang ingin mereka ketahui. Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui dan memahami secara mendalam kondisi dan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perpaduan antara bukti dan data yang dicatat berdasarkan peristiwa, hasil dokumentasi, dan kondisi aktual untuk menghasilkan informasi yang sistematis dan disusun secara cermat yang kemudian dapat disimpulkan untuk kebutuhan penelitian.<sup>43</sup> Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan cara mengumpulkan dan mengamati data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dokumenter seperti foto dan buku yang berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Berikut beberapa hal lain yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian antara lain:

- a. Latar belakang berdirinya BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
- b. Visi dan misi BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
- c. Struktur organisasi di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.
- d. Lokasi BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember.

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 232.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 240.

## E. Analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono yang mengutarakan pendapat Miles dan Huberman, kegiatan analisis dan kualitatif dalam bentuk interaksi dilakukan melalui empat jenis analisa yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data Display*), data penarikan kesimpulan (*verification*).

### 1. Pengumpulan data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya ialah melakukan analisis data. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui makna dari hasil yang terkandung dalam data tersebut.<sup>44</sup>

### 2. Reduksi data

Reduksi data membantu peneliti dalam merangkum data pokok dan penting, serta membuat isi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oleh karena itu, data yang diperoleh setelah reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.<sup>45</sup>

### 3. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Melalui penjabaran tersebut, kemudian diorganisasikan dan menyusunnya ke dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami. Dengan memaparkan

---

<sup>44</sup> Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 144-146.

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 247.

fakta tersebut, diharapkan mampu memberi kemudahan untuk memahami yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir. Langkah ini dilakukan setelah menganalisis seluruh data yang ditemukan dan mencari alasan serta penyebab dari setiap kejadian yang terjadi selama proses penelitian kemudian validitas penelitian yang telah ditemukan dan dampak positif yang diperoleh dari hasil penelitian dicatat. Untuk dapat menarik suatu kesimpulan, harus terdapat bukti-bukti yang konsisten dan dapat diandalkan untuk mendukung dan membentuk hipotesis sehingga kesimpulan yang diambil dapat diandalkan dan tepat.<sup>46</sup>

#### F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik menguji keabsahan data dengan menggunakan hasil wawancara untuk menguji keabsahan data. Peneliti sekaligus memanfaatkan observasi, wawancara mendalam terhadap informan, serta mendokumentasikan sumber data yang sama terhadap objek penelitian yang diteliti. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi mengharuskan peneliti meneliti data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Keabsahan data tersebut diperiksa dengan membandingkan hasil observasi atau wawancara dengan informasi yang ada. Selain itu juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memahami bagaimana penerapan GCG, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 252.

yang ditimbulkan dari penerapan GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperoleh informasi dari masyarakat.

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Tahap yang pertama adalah tahap pra lapangan, tahap ini diawali dengan terlebih dahulu mengidentifikasi topik penelitian, mengumpulkan informasi terkait ada atau tidaknya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip GCG serta dampak yang ditimbulkan. Langkah kedua adalah peneliti langsung terjun ke lapangan ataupun datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi dan melakukan kegiatan observasi secara langsung, mengambil dokumentasi, serta mewawancarai pemberi informasi. Dan langkah terakhirnya adalah menyusun laporan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian menyajikannya secara langsung maupun secara deskriptif.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Lokasi BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Terletak di Jl. Ahmad Yani Lingkungan No.86, Sumber Dandang, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Telp. (0331) 411664.

##### **2. Sejarah BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

###### **a. Sejarah singkat BPR Nur Semesta Indah**

BPR merupakan lembaga resmi perbankan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang dengan jelas mengatur bahwa terdapat dua jenis bank, yakni Bank Umum dan BPR. BPR merupakan bank yang dalam menjalankan operasional usahanya secara konvensional atau syariah dan tidak menyediakan jasa pembayaran sebagai bagian dari operasionalnya.

Pada tanggal 27 Oktober 1988, kebijakan Pemerintah mengenai deregulasi kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan diumumkan. Hal ini mendorong Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), Kec. Kencong yang pada saat itu mengadakan arisan warga Nahdlatul Ulama (awanu) untuk menginisiasi pendirian perusahaan perbankan yang akan berperan dalam pengembangan sektor perekonomian khususnya bagi masyarakat perdesaan.

Sejak bulan Agustus 1990, mulai dirintis pendirian perusahaan perbankan diawali dengan usulan arah pendirian dan pedoman kerja operasional Bank Perkreditan Rakyat Nur Buana Indah, nama Bank tersebut kemudian diubah menjadi Nur Semesta Indah. Irawan Soerodjo, S.H., merupakan seorang notaris di Jember yang pada bulan November membantu pengurusan izin pendirian usaha. Secara resmi pada tanggal 2 Mei 1992 K.H. Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia periode 1999-2001) karena telah memenuhi semua persyaratan dan perizinan, beliau membuka dan meresmikan PT BPR Nur Semesta Indah. Sejak saat itu, PT BPR Nur Semesta Indah resmi sudah beroperasi dengan adanya beberapa perizinan, antara lain:

- 1) Izin prinsip dari Menteri Keuangan No.S.047/MK.13/1991 tanggal 11 Januari 1991.
- 2) Izin Menteri Kehakiman No.C2-8235.HT01.01.TH'91 tanggal 28 Desember 1991.
- 3) Izin operasional usaha dari Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.13/1992 tanggal 3 Maret 1992.

b. Perkembangan BPR Nur Semesta Indah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT BPR Nur Semesta Indah juga mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan angka kredit bermasalah (NPL) yang tinggi serta mulai menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini juga bertepatan dengan krisis moneter tahun 1997 yang terjadi di Indonesia. Saat itu, H. Syakir Asy'ari yang

menjabat sebagai Direktur Utama mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan oleh Edi Surono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur. Sedangkan posisi Direktur digantikan oleh Kuswatul Maslukhah.

Dengan pergantian pimpinan baru, PT BPR Nur Semesta Indah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada waktu tersebut, PT BPR Nur Semesta Indah dapat mengembalikan kepercayaan dari bank umum dan lembaga keuangan lainnya dalam mengerahkan modal untuk ekspansi usaha. Sehingga PT BPR Nur Semesta Indah dapat menjaga jumlah *non performing loans* dan menambah modal pihak ketiga. Tidak hanya itu, PT BPR Nur Semesta Indah mampu membeli beberapa aset-aset yang penting seperti beberapa tanah dan gedung. Aset tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan untuk membuka cabang baru di Kencong (Kantor Pusat Operasional), di Jember (KC Jember Ahmad Yani), di Balung (Kantor Kas Balung), dan di Kalisat (Kantor Kas Kalisat).

Meskipun kemajuan yang dicapai sangat pesat, namun perbaikan terus dilakukan terutama dari sisi sistem maupun manajemen. Hal ini dilaksanakan agar PT BPR Nur Semesta Indah dapat menjadi salah satu dari BPR terbesar di Kabupaten Jember dengan beberapa kantor pendukung yang cukup memadai. Pada tanggal 13 Maret 2008, untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah, PT BPR Nur Semesta Indah menghasilkan keputusan untuk memindahkan Kantor Pusat Operasionalnya ke gedung yang baru terletak di Jl. Diponegoro No. 39,

Kencong, Jember. Beberapa fasilitas penunjang pun ditambahkan seperti adanya ruang tunggu nasabah yang nyaman, luasnya tempat parkir, dan fasilitas tambahan meliputi adanya komputer dan aula.

Dengan adanya berbagai potensi pendukung, PT BPR Nur Semesta Indah tidak hanya mampu bertahan melainkan juga berkembang dengan beragam konsep seperti berikut:

- 1) Membuka Kantor Kas di Balung, Jember, dan Kalisat sebagai bentuk upaya perluasan pasar.
- 2) Pelayanan yang prima, yaitu pelayanan yang baik dan optimal untuk memuaskan nasabah.
- 3) Meningkatkan SDM dengan memperbanyak pegawai yang menjalani berbagai pelatihan untuk lebih meningkatkan keterampilannya.
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
- 5) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana.
- 6) Secara konsisten mengevaluasi kerja selama periode waktu tertentu.

c. Perkembangan BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Pada tahun 2005 PT BPR Nur Semesta Indah melakukan perluasan pasar dan membuka Kantor Kas Jember yang terletak di di Jl. HOS Cokroaminoto No. 34, Jember Kidul, Kaliwates, Jember. Karena perkembangannya yang pesat, Kantor Kas Jember resmi diubah menjadi Kantor Cabang Jember pada bulan September 2007. Pada tahun 2008, demi peningkatan pelayanan kepada nasabah BPR Nur Semesta Indah berpindah lokasi ke Jl. Ahmad Yani No. 86, Kebonsari, Sumbersari,



Jember. Beberapa kantor kas yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Rambipuji, Kalisat, dan Sukowono merupakan bagian dari Kantor cabang yang baru.<sup>47</sup>

### 3. Visi & Misi BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

#### a. Visi

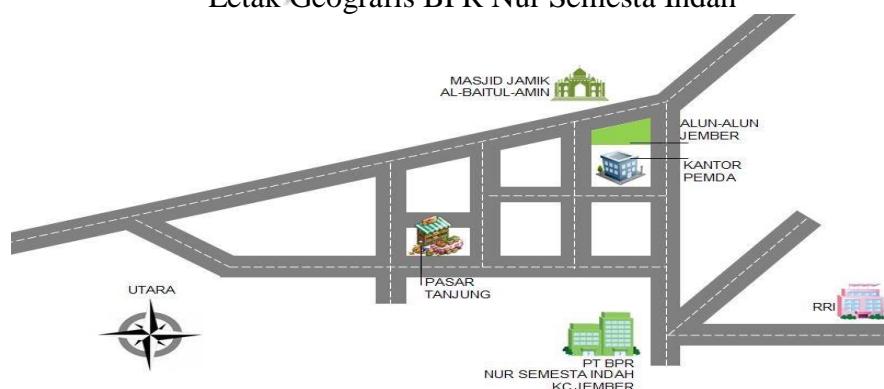
Meningkatkan taraf hidup masyarakat baik material dan spiritual.

#### b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan memberdayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Membangun perusahaan yang sehat, berdaya saing tinggi, dan mampu bertahan dalam situasi apapun.<sup>48</sup>

### 4. Letak Geografis BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Gambar 4.1  
Letak Geografis BPR Nur Semesta Indah



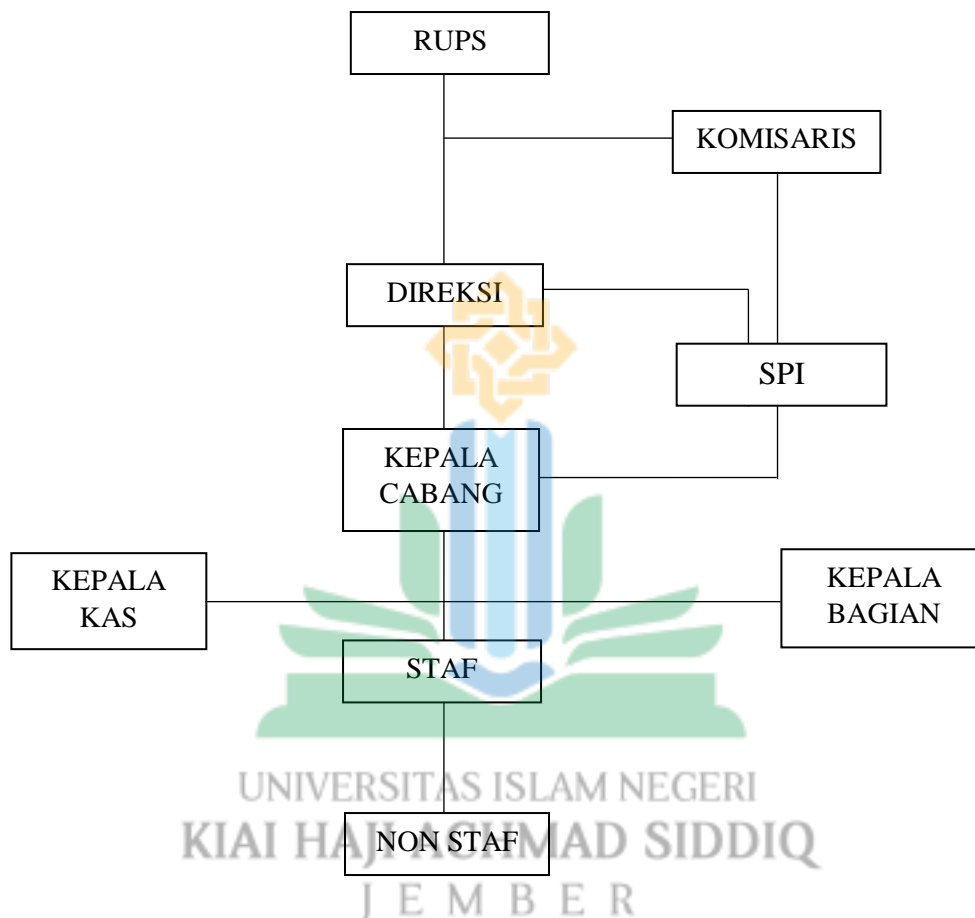
Sumber : BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

<sup>47</sup> Edi Dwijo Prayitno, "Kebijakan Pelayanan dalam Penyaluran Kredit Cepat di BPR Nur Semesta Indah KC Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 41-46.

<sup>48</sup> "BPRNSI", Profil, Diakses pada November 5, 2023, <https://bprnsi.co.id/profil/>.

#### 4. Struktur Organisasi BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Tabel 4.1



Sumber : Dokumen Struktur Organisasi BPR Nur Semesta Indah Cabang Jember

#### 5. Tugas dan fungsi dari masing-masing bagian BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

##### a. Pimpinan Cabang

- 1) Melaksanakan seluruh peraturan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Mengawasi dan mengarahkan Kepala Kas dan *Staff* Kantor Cabang.
- 3) Bertanggung jawab kepada Direksi.

- 4) Mengembangkan rencana strategis bagi Kantor Cabang.
- 5) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan yang telah dicapai.
- 6) Berkoordinasi dan memantau kebutuhan likuiditas dan analisis pesaing dengan Kantor Pusat dan Kantor Kas.

b. Kepala Operasional

- 1) Berkoordinasi dengan Kepala Cabang dalam mengawasi kegiatan operasional.
- 2) Membantu Kepala Cabang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin.
- 3) Memantau kinerja karyawan sesuai *jobdesk* dan tanggung jawabnya.
- 4) Memberikan persetujuan kredit dengan limit yang ditentukan oleh kepala cabang serta memantau penyelesaian kredit.
- 5) Mengkoordinasikan tugas masing-masing bagian serta memeriksa laporan.

c. *Supervisor*

- 1) Melakukan pemantauan produktivitas karyawan dengan memberikan umpan balik dan pelatihan yang bermanfaat.
- 2) Menetapkan tujuan kinerja yang konsisten dengan rencana dan visi organisasi.
- 3) Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prosedur perusahaan.
- 4) Mengatasi terkait masalah pelanggan.
- 5) Memberi dukungan dalam perekrutan dan pemberhentian pegawai.
- 6) Melakukan pengontrolan dan pengendalian informasi anggaran.

d. Kepala Kantor Kas

- 1) Bertanggung jawab untuk mencapai target Kantor Kas yang dikelola.
- 2) Melakukan pengembangan dan pemasaran terkait dana dan jasa yang tersedia.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada nasabah jika terdapat produk atau fitur baru di Bank.
- 4) Mendukung tim yang dipimpin agar lebih semangat mencapai tujuan.

e. *Teller*

- 1) Mengelola transaksi pembayaran dan simpanan baik yang melibatkan kredit, tabungan, atau deposito.
- 2) Mencatat seluruh transaksi dengan bukti arus kas masuk dan keluar, dengan adanya persetujuan instansi yang berwenang.
- 3) Menghitung secara fisik saldo kas harian dari awal sampai akhir melalui rekonsiliasi kas harian dengan persetujuan Manajer Departemen.

f. Admin Kredit

- 1) Menyiapkan dan melakukan pencetakan laporan penagihan pinjaman bulanan untuk diserahkan kepada dewan direksi dan komisaris.
- 2) Menyiapkan dan melakukan pencetakan laporan tunggakan kredit untuk memantau BPR apabila terjadi gangguan penurunan kredit.
- 3) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan *account officer* untuk mendapatkan informasi terkini mengenai portofolio kredit.

- 4) Melakukan upaya penyelesaian permasalahan kredit macet dengan menggunakan beberapa pendekatan persuasif maupun pendekatan hukum.

g. Admin Tabungan

- 1) Melengkapi dan mencetak laporan bulanan simpanan dan deposito serta menyampaikan tembusannya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) Apabila terdapat permintaan kredit dalam jumlah besar yang segera kadaluarsa, maka membuat dan mencetak laporan profil jatuh tempo untuk meminimalisir risiko.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan tetap menjaga fokus pada data dan profil nasabah terkini, khususnya nasabah kunci.

h. *Accounting*

- 1) Bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memverifikasi transaksi keuangan.
- 2) Melakukan pencatatan dokumentasi perusahaan.
- 3) Menyusun laporan keuangan secara akurat sehingga mudah dipahami.

i. *Account Officer*

- 1) Menyetujui atau menolak hasil analisa kelayakan dan kelengkapan permohonan kredit nasabah.

- 2) Melakukan survei terhadap kredit dalam jumlah besar dengan persetujuan kepala bagian kredit.
- 3) Mencoba menyelesaikan masalah kredit yang buruk menggunakan berbagai pendekatan persuasif dan hukum.
- 4) Memberitahukan dan menginfokan kepada nasabah kredit untuk selalu membayar tepat waktu.
- 5) Bertanggung jawab atas NPL bulanan dan validitas data angunan nasabah.

#### **6. Jenis-jenis usaha BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Ada beragam jenis-jenis layanan yang tersedia di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, diantaranya sebagai berikut:

##### **a. layanan pokok**

Terdiri dari 3 layanan yaitu:

- 1) Kredit, meliputi penyimpanan dana, pembayaran kredit, hingga deposito.
- 2) Tabungan, memiliki karakteristik berbentuk rekening tabungan dalam bentuk rupiah tanpa dilengkapi kartu ATM. Di BPR Nur Semesta Indah tabungannya bernama Tabungan Indah yang digunakan oleh nasabah perorangan dengan tingkat bunga yang sesuai dengan perkembangan pasar.
- 3) Deposito, merupakan produk tabungan berjangka yang memungkinkan melakukan penyetoran atau penarikan hanya pada waktu tertentu. Suku bunga BPR NSI yang kompetitif lebih tinggi

dibandingkan suku bunga tabungan biasa. Dengan pilihan jangka waktu yang bervariasi, nasabah dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang memuat data-data yang dihasilkan dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pendukung penelitian ini. Di bawah ini merupakan data hasil temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian

### **1. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi *stakeholders* dan pemegang saham, serta memperkuat kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam operasional suatu perusahaan, industri perbankan harus berpegang pada adanya prinsip GCG.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Marwan Usman Nadhy sebagai Pimpinan Cabang BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember saat berada di ruang kerjanya, beliau menyampaikan bahwa :

“Terkait GCG atau yang lebih dikenal dengan tata kelola Bank didalamnya terdapat banyak hal yang dibahas. Diantaranya yang pertama transparansi, contohnya dapat dilihat dari laporan neraca tiap bulan yang kemudian dikirimkan kepada OJK sehingga semua orang bisa mengetahui terkait laporan keuangan dan menilai Bank tersebut tergolong Bank yang sehat atau tidak. Yang kedua akuntabilitas, dapat dilihat dari dana yang diterima dari masyarakat dikelola dan diawasi langsung oleh OJK. Selain itu terkait deposito

harus dijaga *rate-nya* serta proses pencairan kredit selama prinsip *prudencial* (kehati-hatian) berjalan, kredit tersebut akan tetap dicairkan dengan mengecek SLIK terkait identitas dan riwayat keuangan orang yang bersangkutan. Yang ketiga tanggung jawab, hal ini tercermin dari kegiatan operasional BPR Nur Semesta Indah yang berpedoman pada ketentuan dari OJK. Yang keempat independensi, pihak Bank dikelola secara mandiri yakni tanpa adanya campur tangan pihak lain. Dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan, pihak Bank memperlakukan nasabah dengan cara yang sama. Namun untuk nasabah yang memiliki deposito besar lebih diprioritaskan”.<sup>49</sup>

Hal serupa disampaikan pula oleh Ibu Selusih Ernawati sebagai

Kepala Operasional di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember,

beliau menyampaikan :

“Di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember telah menerapkan 5 prinsip-prinsip GCG sesuai dengan Peraturan OJK. Lima prinsip tersebut yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Pada prinsip transparansi, pihak bank mengupayakan bahwa informasi yang tersedia terkait Bank dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada prinsip akuntabilitas, sistem kerja di BPR Nur Semesta Indah bekerja sesuai *jobdesk* masing-masing. Begitupula dengan prinsip pertanggung jawaban, penerapan prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah sudah sesuai SOP. Prinsip independensi, disini BPR tidak dipengaruhi oleh adanya kepentingan sepihak atau dominasi pihak manapun. Dan prinsip kewajaran serta kesetaraan, pihak BPR memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali”.<sup>50</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Vida Arfitasari

sebagai Admin Kredit terkait implementasi prinsip GCG di BPR Nur

Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Saya selaku Admin Kredit terkait 5 prinsip-prinsip GCG tersebut yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan sudah diterapkan dengan baik dan sangat penting bagi keberlangsungan Bank. Misalnya transparansi, BPR Nur Semesta Indah menyampaikan kondisi keuangan maupun non keuangan secara *on time* tiap 1

<sup>49</sup> Marwan Usman Nadhy, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>50</sup> Selusih Ernawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.



tahun sekali. Untuk akuntabilitas, pihak BPR memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama demi kemajuan perusahaan dengan melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertanggung jawaban, dalam hal ini terkait kredit sudah diterapkan sesuai SOP yang berlaku. Misalnya saat ada nasabah yang mengajukan kredit terlebih dahulu dicek kelengkapan persyaratannya harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang berlaku di Bank. Setelah itu pihak Bank dan pengawas melakukan survei yang kemudian diajukan ke pimpinan untuk diterima atau tidak. Independensi, hal ini tercermin dari cara kerja BPR yang bebas dari adanya benturan kepentingan pihak manapun. Yang terakhir kewajaran dan kesetaraan, hal ini dapat disaksikan dari pegawainya yang dapat mengakses informasi perusahaan sesuai prinsip transparansi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan bagi perusahaan”.<sup>51</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fidayanti yang

juga sebagai Admin Kredit terkait implementasi prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Kelima prinsip GCG tersebut sudah dilakukan oleh BPR Nur Semesta Indah dalam aktivitas sehari-harinya. Untuk transparansi, laporan keuangan BPR tiap tahunnya ditempelkan di dinding laporan keuangan agar semua pihak yang berkepentingan memiliki kemudahan untuk mengaksesnya. Akuntabilitas, seluruh pegawai di BPR Nur Semesta Indah melaksanakan segala yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dengan baik tanpa melempar tanggung jawab tersebut kepada karyawan lain. Kalau pertanggung jawaban, implementasinya sesuai SOP dari pimpinan. Saya bagian kredit yang pertama nasabah pengajuan nanti kita cek dulu KTP nya lengkap semuanya lengkap baru diproses selanjutnya tanda tangan pimpinan. Nanti kalau sudah diterima baru kita cairkan. Kemandirian, dalam hal ini BPR membantu pengelolaan peran dan fungsi masing-masing jabatan dengan mandiri. Dan kewajaran serta kesetaraan, dalam mengambil keputusan pihak BPR memberikan perlakuan yang sama terhadap nasabah maupun para *stakeholders* lainnya”.<sup>52</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Murti Handayani sebagai Admin Tabungan terkait implementasi prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

---

<sup>51</sup> Vida Arfitasari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

“Saya kurang mengerti terkait prinsip-prinsip GCG yang didalamnya terdapat *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* seperti yang ditanyakan”.<sup>53</sup>

Oleh karena itu peneliti mengganti istilah *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dengan transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam memperlakukan nasabah.

“Untuk transparansi, selama ini pihak Bank sudah terbuka terhadap nasabah terkait segala informasi yang ada baik tentang laporan keuangan dan lainnya. Akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari BPR Nur Semesta Indah yang membolehkan karyawannya untuk ikut serta dalam kegiatan seminar guna meningkatkan kompetensinya. Pertanggung jawaban, pihak bank menjalankan kegiatannya sesuai dengan SOP dan ketentuan dari OJK sehingga segala kegiatan usahanya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Saya selaku admin tabungan untuk pembukaan rekening harus memenuhi syarat, menanyakan terkait sumber dana dan nantinya akan dipergunakan untuk apa. Independensi, disini BPR menghindari adanya keikutsertaan yang berlebihan dari *stakeholders*. Kewajaran dan kesetaraan, BPR selalu berhati-hati dalam bersikap kepada masyarakat dan bertindak secara wajar”.<sup>54</sup>

Untuk mengetahui implementasi prinsip GCG secara lebih mendetail peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Rike Wijayanti *Accounting* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Pada transparansi, terkait nasabah misalnya nasabah kredit pihak Bank menyampaikan aturan dan kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga nasabah tau haknya apa dan pihak Bank juga tau apa kewajibannya. Akuntabilitas, dalam hal pelayanan BPR Nur Semesta Indah memberikan pelayanan terhadap nasabah sesuai jam operasional yang berlaku namun jika Bank sudah hampir tutup jika ada nasabah datang pihak Bank tetap memberikan pelayanan dengan pembayaran menggunakan uang pas. Pertanggung jawaban, dalam pelaksanaannya juga dilakukan sesuai dengan OJK dan bekerja sesuai SOP. Independensi, BPR dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>53</sup> Fidayanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>54</sup> Murti Handayani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

operasionalnya bebas dari tekanan pihak lain. Dan untuk kewajaran serta kesetaraan, nasabah mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama. Namun untuk nasabah dari Bank lain yang menaruh dana pada kita lebih diprioritaskan seperti diberikan suku bunga khusus”.<sup>55</sup>

Untuk memastikan terkait implementasi prinsip-prinsip GCG tentang pemberian pelayanan terhadap nasabah, peneliti mewawancarai 4 nasabah dan mereka mengatakan :

Menurut Bapak Nirwan :

“Sebelum mengajukan pembiayaan pihak Bank itu memberitahu syaratnya apa saja. Fotokopi KK, jaminan, KTP, sama akte nikah. Pelayanan disini juga cepat dan tidak perlu lama mengantri. Pegawainya juga ramah-ramah. Saat pencairan pun hanya perlu menunggu beberapa jam”.<sup>56</sup>

Menurut Ibu Nida :

“Diawal pihak Bank itu memberitahu ketentuan dan syarat yang perlu dilengkapi dulu seperti KTP dan jaminan. Pelayanannya juga bagus sekali. Saat pencairan dana mereka juga tepat waktu. Saya selalu tepat waktu dalam membayar angsuran jadi pihak Bank tidak menagih ke rumah. Fasilitasnya sudah bagus ada kursi tunggu dan nasabah yang datang segera dilayani”.<sup>57</sup>

Menurut Bapak Noli :

“Saat saya pertama mengajukan pembiayaan Bank menjelaskan persyaratannya apa saja. Saat saya datang pegawai juga langsung memberikan pelayanan yang baik. Dana yang dicairkan cepat dan angsuran saya juga lancar. Fasilitasnya bagus sudah ada pendingin ruangnya, bersih, ada kursi tunggu juga”.<sup>58</sup>

Bapak Yanto :

“Pihak Bank menjelaskan pada saya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu beserta ketentuannya. Pelayanannya juga bagus tidak ribet. Saat pencairan dana enak sekali kadang saya yang mau pinjam sini pagi mengajukan siang sudah dapat. Rumah saya dekat dari sini jadi bayarnya selalu tepat waktu. Fasilitasnya juga lumayan enak tidak antri dan pegawainya juga cepat”.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Rike Wijayanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>56</sup> Nirwan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 November 2023.

<sup>57</sup> Nida, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 November 2023.

<sup>58</sup> Noli, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 November 2023

<sup>59</sup> Yanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 16 November 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, penerapan GCG pada bank mengikuti Peraturan OJK No. 4/PJOK.03/2015 yang menjelaskan bahwa dalam GCG terdapat 5 prinsip yaitu adanya keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Namun tidak semua karyawan mengetahui terkait apa itu GCG meski dalam pelaksanaannya mereka sudah menerapkannya. Beberapa karyawan di BPR Nur semesta Indah Kantor Cabang Jember baru memahami istilah GCG setelah kelima prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* disampaikan dengan cara yang lebih sederhana menjadi keterbukaan, kejelasan fungsi, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan nasabah .

Pada prinsip keterbukaan (*transparency*), BPR senantiasa menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan tepat waktu tiap 1 tahun sekali yang kemudian dikirimkan kepada OJK sehingga semua orang bisa mengetahui terkait laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut biasanya ditempelkan di dinding laporan keuangan. Selain itu pihak Bank juga sudah terbuka terhadap nasabah terkait segala informasi yang ada. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) yaitu pihak Bank yang dalam kegiatannya dana yang diterima dari masyarakat dikelola dan diawasi langsung oleh OJK, bekerja sesuai *jobdesk* masing-masing, memastikan bahwa seluruh pegawai yang bekerja disana berkesempatan sama dengan

mbolehkan pegawainya ikut serta dalam kegiatan seminar guna meningkatkan kompetensinya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai jam operasional yang berlaku. Prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), hal ini tercermin dari kegiatan operasional BPR Nur Semesta Indah yang berpedoman pada ketentuan dari OJK dan SOP yang berlaku. Prinsip kemandirian (*independency*) yakni sistem yang mengelola BPR dengan independen tanpa adanya campur tangan pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak atau dominasi pihak lain, dan pengelolaan peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), pihak Bank memperlakukan nasabah dengan cara yang sama. Dengan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Namun untuk nasabah yang memiliki deposito besar lebih diprioritaskan seperti diberikan suku bunga khusus.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik sangatlah penting dilakukan dan menerapkan prinsip-prinsip CGC tertuang dalam Peraturan OJK No .4/PJOK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Tata Kelola BPR. Hal ini wajib berlaku bagi setiap perusahaan atau semua organisasi. GCG juga merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kesesuaian suatu Bank, termasuk apakah Bank tersebut sehat atau tidak.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marwan Usman Nadhy sebagai Pimpinan Cabang BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Untuk faktor pendukungnya SDM disini telaten dan mumpuni. Sistem yang digunakan juga mumpuni untuk mendukung penerapan prinsip GCG. Terkait masalah hambatan itu biasanya dari debitur atau nasabah yang terkadang kurang pemahaman sehingga perlu untuk dijelaskan secara detail. Disini banyak yang terkadang hanya setor fotokopi tanpa memberikan jaminan. Fikirnya mereka hanya dengan KTP uang sudah bisa cair”.<sup>60</sup>

Ibu Selusih juga menambahkan penjelasan Bapak Marwan terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip *Good Corporate Governance*, beliau menyampaikan :

“Kalau faktor pendukungnya saya rasa semua harus sesuai SOP dan *jobdesk* supaya operasional berjalan baik dan lancar hubungan antara divisi yang satu dengan divisi lainnya. Yaitu antara kepala operasional, marketing, dan manajemen. Untuk faktor kendala dari karyawan mungkin tidak terlalu banyak karena sudah ada sistem ceklok *fingerprint*. Karena kita satu tim maka kita membuat kebijakan untuk meminimalisir atau misalnya kita ada satu atau dua orang yang terlambat kita itu memberikan teguran atau peringatan supaya memperbaiki orang tersebut. Terkait hambatan dari nasabah mungkin dari segi pengajuan. Batas dari nasabah yang melakukan pengajuan itu 60 tahun. Tapi dikarenakan beliau nasabah lama pihak Bank bisa memberikan toleransi dengan pertimbangan tertentu”.<sup>61</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Vida Arfitasari sebagai Admin Kredit terkait faktor pendukung dan penghambat dari

<sup>60</sup> Marwan Usman Nadhy, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>61</sup> Selusih Ernawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

implementasi prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang

Jember, beliau menyampaikan :

“Biasanya faktor pendukungnya itu *Account Officer* nya itu bisa diajak kerja sama. Kalau faktor penghambatnya itu biasanya nasabah yang mengajukan itu terkadang ada hal yang ditutupi. Misalnya mereka masih memiliki pinjaman ditempat lain”.<sup>62</sup>

Ibu Fidayanti juga menambahkan penjelasan dari Ibu Vida Arfitasari

sesama Admin Kredit, beliau menyampaikan :

“Faktor pendukungnya itu sudah terdapat sistem hukum yang baik yang mendukung implementasi prinsip GCG. Penghambatnya mungkin kalau ada nasabah yang tidak membayar. Sulit dijelaskan misal ada nasabah yang pembayarannya tidak lancar namun karena nasabah lama kitanya tidak enak jika menolaknya”.<sup>63</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Murti Handayani sebagai Admin

Tabungan terkait faktor pendukung dan penghambat prinsip GCG di BPR

Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Terkait faktor pendukungnya, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan sudah mengarah pada implementasi prinsip-prinsip GCG. Faktor penghambatnya terdapat pada nasabah yang terkadang masih ada dari mereka yang tidak mau ribet ditanyai ini itu. Padahal kita dari LPS harus tahu. Adapula nasabah yang belum faham terkait pajak. Kita kan simpanan diatas 7 juta kena pajak dan beberapa nasabah menolak hal tersebut”.<sup>64</sup>

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi

prinsip GCG secara lebih mendetail peneliti juga melakukan wawancara

dengan ibu Rike Wijayanti sebagai *account officer*, beliau menyampaikan :

“Faktor pendukungnya itu sudah terdapat pelaksanaan GCG yang tepat. Para karyawan bekerja sesuai *jobdesk* masing-masing sesuai kapasitasnya seperti bagian *update* yang berjalan sesuai porsinya dan tidak ada rasa saling iri terkait pekerjaan. Untuk faktor penghambat mungkin dari nasabah, saat ini untuk mengajukan kredit sebagian nasabah kurang terbuka diawal. Mereka tidak jujur penghasilannya berapa sehingga pihak Bank bisa memutuskan akan memberi

<sup>62</sup> Fida Arfitasari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>63</sup> Yanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>64</sup> Murti Handayani, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

pinjaman berapa berdasarkan kemampuan nasabah. Hal ini nantinya menyebabkan terjadinya kelambatan pembayaran. Bukan berarti kita tidak survei pihak Bank sudah survei misalnya usahanya apa. Cuma yang kita tidak bisa tau itu *cashflow* nya mereka. Memang terkait *cashflow* bisa dilihat dari buku tabungan namun untuk kemajuan usaha mereka pihak Bank kurang tau akan hal itu”.<sup>65</sup>

Setiap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap sektor lembaga keuangan tentunya mempunyai faktor pendukung dan penghambat, seperti yang dituangkan dalam PJOK No.04/PJOK.3/2015 yang didalamnya mengatur terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah melalui perundingan dengan dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan *shareholders* lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mengambil keputusan bersama sehingga nantinya keputusan akhir bukanlah keputusan sepihak melainkan keputusan bersama.

### **3. Dampak implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Hal ini disampaikan Oleh Bapak Marwan Usman Nadhy sebagai Pimpinan Cabang BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Dampaknya kalau memakai prinsip GCG (tata kelola Bank) sangat positif. Untuk dampak penggunaan prinsip keterbukaan, masyarakat akan lebih tenang menitipkan dana atau meminjam dana dari kita karena info terkait laporan keuangan Bank mereka bisa

---

<sup>65</sup> Rike Wijayanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.



mengaksesnya. Untuk prinsip akuntabilitas, disini kan perbankan itu tercatat dan terukur jadi mereka yang tidak *performace* akan keliatan. Prinsip tanggung jawab, karena bekerja sesuai *jobdesk* atau keahlian masing-masing hal ini akan meningkatkan produktivitas Bank. Prinsip kemandirian, dengan prinsip ini pihak Bank mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pihak lain. Dan prinsip kewajaran dan kesetaraan, semua pegawai berkesempatan yang sama intinya tidak ada yang namanya membeda-bedakan”.<sup>66</sup>

Ibu Selusih juga menambahkan penjelasan Bapak Marwan, beliau menyampaikan :

“Kalau aturan itu baik pasti dampaknya juga baik. Prinsip transparansi, dengan adanya prinsip ini membuat kepercayaan masyarakat pada pihak Bank semakin meningkat. Prinsip akuntabilitas, menghadapi prinsip ini yang sudah diterapkan oleh bank terkadang kita harus melihat kondisi debitur juga. Sehingga dampaknya sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Prinsip tanggung jawab, dengan prinsip ini pelayanan yang diberikan kepada nasabah semakin baik. Prinsip kemandirian, dengan prinsip ini pihak Bank dapat mengambil keputusan yang dianggap penting bagi Bank secara mandiri. Dan prinsip kewajaran dan kesetaraan, bonus karyawan diberikan sesuai kinerja dan prestasi masing-masing”.<sup>67</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Vida Arfitasari

terkait dampak dari implementasi prinsip GCG di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, beliau menyampaikan :

“Dampak penerapan prinsip transparansi, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan hubungan dengan nasabah lancar. Prinsip akuntabilitas, menghadapi prinsip ini para karyawan itu dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan *jobdesk nya* masing-masing. Prinsip tanggung jawab, dengan prinsip tersebut pihak Bank dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat sehingga administrasinya jadi sesuai dan tertib serta pencairannya juga lebih cepat. Prinsip kemandirian, dengan prinsip tersebut pihak Bank dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan demi keberlangsungan Bank tanpa adanya campur tangan pihak lain. Dan prinsip kewajaran dan kesetaraan, dengan prinsip ini semua karyawan mendapat perlakuan yang adil dan setara”.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Marwan Usman Nadhy, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>67</sup> Selusih Ernawati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

<sup>68</sup> Admin, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Rike Wijayanti sebagai *account officer*, beliau menyampaikan :

“Dampak penerapan prinsip transparansi, dengan prinsip ini memudahkan pihak Bank untuk mendapatkan nasabah. Prinsip akuntabilitas, dengan prinsip ini Bank memiliki ukuran kinerja untuk semua jajarannya. Prinsip tanggung jawab, dengan prinsip ini pihak Bank juga mampu melaksanakan tanggung jawab yang ada kemudian mengevaluasinya. Prinsip kemandirian, dengan prinsip ini pihak Bank tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Dan prinsip kewajaran dan kesetaraan, dengan prinsip ini baik karyawan atau nasabah akan puas karena Bank memberikan kesempatan untuk memberi masukan dan saran demi kepentingan Bank”.

Menurut *Corporate Governance forum* di Indonesia, GCG mempunyai sejumlah dampak dan manfaat bagi perusahaan. Diantaranya adalah membuat kinerja perusahaan meningkat dengan mengambil keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan pelayanan terhadap pemegang saham, mempermudah mendapat dana melalui peningkatan kepercayaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengembalikan kepercayaan penanam modal (investor) ketika menanamkan modalnya ketika di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember mengenai dampak penerapan prinsip *good corporate governance* yakni prinsip yang menjadi pedoman pengendalian perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dengan bertanggung jawab kepada para *shareholders* pada khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya dalam memberikan dampak yang sangat positif demi keberlangsungan Bank. Karena sesuatu yang bersifat positif akan berdampak positif.

### C. Pembahasan Temuan

Dari data dan hasil analisis yang dilakukan, maka perlu dilakukan pembahasan temuan dalam bentuk interpretasi dengan hasil pembahasan dan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun rincian pembahasan ini antara lain sebagai berikut :

#### 1. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi umumnya merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain Penerapan tata kelola sangat penting dilakukan dikarenakan adanya tantangan dan risiko yang dihadapi BPR, baik secara internal maupun eksternal.<sup>70</sup>

*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme kerja yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan para *shareholders* lainnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian yang seminimal mungkin bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk mengelola usahanya dengan baik dengan tetap menghormati hak dan

---

<sup>69</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 1.

<sup>70</sup> Muh. Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, 10-11.

kewajibannya.<sup>71</sup> Lima pilar GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*).

BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

a) Prinsip *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi berarti perusahaan perlu menyediakan informasi penting dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan operasional bisnisnya. Dalam hal ini BPR Nur Semesta Indah senantiasa menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan tepat waktu tiap 1 tahun sekali yang kemudian dikirimkan kepada OJK sehingga semua orang bisa mengetahui terkait laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut biasanya ditempelkan di dinding laporan keuangan. Selain itu pihak Bank juga sudah terbuka terhadap nasabah terkait segala informasi yang ada. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPR Nur Semesta Indah sudah melaksanakan prinsip GCG yakni transparansi dimana pihak bank terbuka akan seluruh informasi kepada masyarakat tanpa ada sedikitpun yang ditutupi.

b) Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prinsip inti penerapan GCG yang berarti perusahaan harus mampu melaporkan kinerjanya secara transparan dan

---

<sup>71</sup>Handrik Manossoh, *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 15-16.

adil. Dalam hal ini BPR Nur Semesta Indah yang dalam kegiatannya dana yang diterima dari masyarakat dikelola dan diawasi langsung oleh OJK, bekerja sesuai *jobdesk* masing-masing, memastikan bahwa seluruh pegawai berkesempatan sama dengan membolehkan karyawannya ikut serta dalam kegiatan seminar guna meningkatkan kompetensinya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai jam operasional yang berlaku. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPR Nur Semesta Indah sudah melaksanakan prinsip GCG yakni akuntabilitas sebab kinerjanya dipantau oleh OJK sehingga tidak ada yang ditutupi. Selain itu pihak BPR juga bersikap adil baik kepada karyawan maupun nasabahnya. Hal ini ditunjukkan dengan pihak Bank yang membolehkan karyawannya mengikuti seminar tanpa terkecuali serta memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai jam operasional yang merupakan hak bagi semua nasabah.

c) Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibilitas berarti bahwa perusahaan harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha agar dapat diakui. Pada BPR Nur Semesta Indah hal ini tercermin dari kegiatan operasionalnya yang berpedoman pada ketentuan dari OJK dan SOP yang berlaku. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPR Nur Semesta Indah sudah melaksanakan prinsip GCG yakni responsibilitas dimana dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya Bank tidak melanggar SOP yang berlaku dan diawasi langsung oleh OJK.

d) Prinsip *Independency* (Independen)

Independensi artinya perusahaan dikelola secara mandiri sehingga setiap jabatan dalam perusahaan tidak dapat saling mempengaruhi atau diintervensi oleh orang lain. Dalam hal ini sistem pengelolaan BPR Nur Semesta Indah dikelola secara independen tanpa campur tangan pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak atau dominasi pihak lain, dan pengelolaan peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPR Nur Semesta Indah sudah melaksanakan prinsip GCG yakni independen dimana keputusan yang diambil tersebut secara mandiri tanpa adanya campur tangan pihak manapun yang mempengaruhi.

e) Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Kewajaran dan kesetaraan bahwa saat menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan *stakeholders* dan *shareholders* dengan berdasarkan pada prinsip adil serta kesetaraan. Dalam hal ini BPR Nur Semesta Indah memperlakukan nasabah dengan cara yang sama dengan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Namun untuk nasabah yang memiliki deposito besar lebih diprioritaskan seperti diberikan suku bunga khusus. Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPR Nur Semesta Indah sudah melaksanakan prinsip GCG yakni kesetaraan dan kewajaran dimana seluruh nasabah

mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya membedakan satu sama lain.

BPR Nur Semesta Indah mampu menerapkan lima prinsip GCG berdasarkan Peraturan OJK No. 4/PJOK.03/2015. Meski sudah dilakukan, namun belum semua karyawan mengetahui apa itu *Good Corporate Governance*. Mereka baru mendengar istilah *Good Corporate Governance* setelah disederhanakan menjadi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap lembaga keuangan tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terdapat di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember agar penerapan prinsip GCG dapat berlangsung secara maksimal.

Ketika dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember terdapat faktor penghambat, maka Bank harus mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip tersebut pada BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember. Adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember, yaitu faktor nasabah yang terkadang kurang pemahaman sehingga perlu

untuk dijelaskan secara detail. Hal ini meliputi batas usia nasabah yang melakukan pengajuan, nasabah yang kurang terbuka pada pihak bank, dan nasabah yang telat bayar. Untuk mengatasi hal tersebut, BPR Nur Semesta Indah berusaha memberikan penjelasan secara mendetail terkait informasi yang dibutuhkan nasabah, melakukan survei, dan melihat *cashflow* mereka. Selain itu pihak Bank juga melakukan perundingan dengan dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham lainnya.

Sedangkan faktor pendukung dalam dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Nur Semesta Indah diantaranya SDM dan sistem yang telaten dan mumpuni, hubungan kerjasama antar divisi yang satu dengan divisi lainnya yang baik dan lancar, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan sudah mengarah pada penerapan GCG, serta sudah terdapat pelaksanaan sistem GCG yang tepat.

### **3. Dampak implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember**

Menurut *Forum For Corporate Governance* di Indonesia, *Good Corporate Governance* mempunyai sejumlah dampak serta manfaat bagi perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* mengacu pada cara yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan dalam mengelola Bank agar kedepannya menjadi lebih baik demi keberlangsungan Bank itu sendiri. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini hanya bisa dicapai melalui penerapan kebijakan yang tepat secara sistematis, yang sekaligus dapat mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban,



independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya berdampak pada peningkatan reputasi Bank melainkan juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya menjadi pedoman pengendalian perusahaan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal tanggung jawabannya kepada pemangku kepentingan dan pemegang kepentingan lainnya yang telah memberikan dampak sangat baik bagi keberlangsungan BPR Nur Semesta Indah.

Diantara dampaknya yaitu terkait prinsip transparansi, masyarakat akan lebih tenang menitipkan dana atau meminjam dana dari kita karena info terkait laporan keuangan Bank mereka bisa mengaksesnya. Untuk prinsip akuntabilitas *performance* Bank akan keliatan dan karyawan dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan *jobdesk nya* masing-masing. Prinsip tanggung jawab, karena bekerja sesuai *jobdesk* atau keahlian hal ini akan meningkatkan produktivitas Bank serta mengevaluasi kinerjanya. Prinsip kemandirian, dengan prinsip ini pihak Bank mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pihak lain serta dapat mengambil keputusan yang diperlukan demi keberlangsungan Bank secara mandiri. Prinsip kewajaran dan kesetaraan, dengan prinsip ini semua karyawan memiliki kesempatan yang adil dan setara, bonus karyawan diberikan sesuai kinerja dan prestasi masing-masing, serta baik karyawan atau nasabah akan puas karena Bank

memberikan kesempatan untuk memberi masukan dan saran demi kepentingan Bank.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR

Nur Semesta Indah meliputi :

###### a. Prinsip *Transparency* (Keterbukaan)

BPR Nur Semesta Indah senantiasa menyampaikan kondisi keuangan dan non keuangan tepat waktu tiap 1 tahun sekali yang kemudian dikirimkan kepada OJK sehingga semua orang bisa mengetahui terkait laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut biasanya ditempelkan di dinding laporan keuangan. Selain itu pihak Bank juga sudah terbuka terhadap nasabah terkait segala informasi yang ada.

###### b. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

BPR Nur Semesta Indah yang dalam kegiatannya dana yang diterima dari masyarakat dikelola dan diawasi langsung oleh OJK, bekerja sesuai *jobdesk* masing-masing, memastikan bahwa seluruh karyawan berkesempatan sama dengan membolehkan karyawannya ikut serta dalam kegiatan seminar guna meningkatkan kompetensinya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai jam operasional yang berlaku.

c. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

BPR Nur Semesta Indah yang berpedoman pada ketentuan dari OJK dan SOP yang berlaku.

d. Prinsip *Independency* (Independen)

BPR Nur Semesta Indah secara independen tanpa campur tangan pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak ataupun dominasi orang lain, serta pengelolaan peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri.

e. Prinsip *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

BPR Nur Semesta Indah memperlakukan nasabah dengan cara yang sama. dengan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. Namun untuk nasabah yang memiliki deposito besar lebih diprioritaskan seperti diberikan suku bunga khusus.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah

a. Faktor pendukung

- 1) SDM serta sistem yang telaten dan mumpuni
- 2) Hubungan kerjasama antar divisi yang satu dengan divisi lainnya yang baik dan lancar
- 3) Aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan perusahaan sudah mengarah terhadap penerapan GCG
- 4) Terdapat pelaksanaan sistem GCG secara tepat.

b. Faktor penghambat

- 1) Batas usia nasabah yang melakukan pengajuan.
- 2) Nasabah yang kurang terbuka pada pihak Bank.
- 3) Nasabah yang telat bayar.

c. Solusi yang dapat dilakukan

- 1) Memberikan penjelasan secara mendetail terkait informasi yang dibutuhkan nasabah
- 2) Melakukan survei
- 3) Melihat *cashflow* nasabah
- 4) Melakukan perundingan dengan dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan *shareholder* lainnya.

3. Dampak implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah

a. Prinsip transparansi

Masyarakat akan lebih tenang menipkan dana atau meminjam dana dari kita karena info terkait laporan keuangan Bank mereka bisa mengaksesnya.

b. Prinsip akuntabilitas

*Perfomance* Bank akan keliatan dan karyawan dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan *jobdesk nya* masing-masing.

c. Prinsip tanggung jawab

Karena bekerja sesuai *jobdesk* atau keahlian hal ini akan meningkatkan produktivitas Bank. Selain itu pihak Bank dapat

melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat sehingga administrasinya jadi sesuai dan tertib serta pencairannya juga lebih cepat serta dapat mengevaluasi kekurangannya.

d. Prinsip kemandirian

Prinsip ini pihak Bank mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pihak lain serta dapat mengambil keputusan yang diperlukan demi keberlangsungan Bank secara mandiri.

e. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

Prinsip ini nasabah akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Bank karena Bank memperhatikan kepentingan seluruh orang. Selain itu prinsip ini membuat karyawan atau nasabah merasa puas karena Bank memberikan kesempatan untuk memberi masukan dan saran demi kepentingan Bank.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi BPR Nur Semesta Indah

- a. Melakukan kegiatan kehumasan secara aktif agar masyarakat memahami keunggulan produk pembiayaan perbankan syariah dan ikut serta dalam pengembangan perbankan syariah.
- b. Menginformasikan dan memotivasi karyawan terkait prinsip-prinsip GCG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Wahyu Indri. "Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BRI Syariah KCP Langkat Stabat". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Az Zahro, Nur Laili. "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang". Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2018.
- Edelwis, Ni Luh Putu Katrin, I Gde Ary Wirajaya. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada PT. BPR Kusemas Dana Mandiri". *Jurnal Akuntansi* 23, no. 1 ( Bali 2022): 40.
- Efendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Fauzan, Prayitno Hadi dkk. "Tata Kelola Pesantren Salafiyah pada PT Perspektif Kepemimpinan Nabi". *Jurnal Internasional Seni, Humaniora & Ilmu Sosial* 3, no. 1 (Jember 2022): 59-60.
- Fauzy, Ahmad. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Handayani, Anis Tri. "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat KC Bengkulu". Skripsi, UIN Fatwati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Harahap, Fika Yusti. "Analisis *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah". *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan Juripol* 4 no. 1 (Sumatera Utara 2021): 197.
- Hariasih, Misti, Sumartik. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Harjanti, Agustina Eka. "Evaluasi Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (Kudus 2019): 58-59.
- Hasan, Nurul Ihsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Grup, 2014.
- Hazin, Ahmad. "Penerapan *Good Corporate Governance* di BPRS Bhakti Sumekar Jember". Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Ilham, Muhammad, Wahyu Muh. Syata, Murni Nia. *Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

- Kurinci, Ayu Ismah Azizah, Dewi Tamora Siregar, Nurianti Rahmadhani, Juliana Nasution,,". Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (Medan 2022): 1068.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rusdiana, Dadang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Manossoh, Handrik. *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Mulyani, Sri. "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Malang 2020): 22.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press, 2020.
- Pranata, Indrayan. "Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan (Studi pada PT. JBA Indonesia Cabang Tipar Cakung Periode 2109)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (Jakarta: 2019): 2.
- Prayitno, Edi Dwijo. "Kebijakan Pelayanan dalam Penyaluran Kredit Cepat di BPR Nur Semesta Indah KC Jember". Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Priandini, Elisa Alfi. "Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 51.
- S Bachri, Bachtiar. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (Surabaya 2010).
- S Kaihatu, Thomas. "*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (Surabaya: 2016): 1.
- Salim, Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siboro, Danri Toni. Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Fokus Ekonomi* 2, no. 2 (Medan 2007): 22-23.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Syofyan, Efrizal. *Good Corporate Governance*. Malang: UNISMA Press, 2021.
- Tantia, Fischa Aries. “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Batu Sangkar. Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Wibowo, Edi. “Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (Surakarta 2020): 135.
- Yusuf, Listya. “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada BNI Syariah”. Skripsi, UIN Ar Raniry, 2019.
- “BPRNSI”. Profil. Diakses pada November 5, 2023. <https://bprnsi.co.id/profil/>.
- Tafsir Qur’an”. Al-Hajj Ayat 4. Diakses pada Desember 14, 2023. <https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-41>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Penelitian
Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember	1. Implementasi 2. <i>Good Corporate Governance</i>	1. Pengertian implementasi 2. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> 3. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> 4. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> 5. Dampak dan manfaat <i>Good Corporate Governance</i> 6. Faktor-faktor implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 7. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> 8. <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Indonesia 9. <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat 10. Tahap-tahap penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	1. Sumber Data Primer a. Pimpinan b. Karyawan c. Nasabah 2. Data Sekunder a. Buku b. Dokumentasi c. Skripsi d. Jurnal e. <i>Website</i>	1. Pendekatan dan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Lokasi Penelitian: BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember 3. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi	1. Bagaimana implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Pengimplementasian Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember? 3. Apa dampak implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahdiyatul Muhimah

Nim : 201105010019

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 27 November 2023



Nahdiyatul Muhimah  
NIM. 201105010019

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?
3. Apa dampak implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember?
4. Apakah sebelum Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan atau menyimpan dana di BPR Nur Semesta Indah pihak Bank menjelaskan secara menyeluruh misal persyaratan apa saja yang perlu disiapkan?
5. Apakah saat Ibu/Bapak datang karyawan di BPR Nur Semesta Indah sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai tanggung jawabnya?
6. Apakah saat pencairan dana Bapak/Ibu ada keterlambatan dari BPR Nur Semesta Indah?
7. Apakah fasilitas yang disediakan di BPR Nur Semesta Indah sudah mendukung?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1655 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 September 2023

Kepada Yth.

Pimpinan cabang BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember  
Jln. Ahmad Yani Lingkungan No.86, Sumberdandang, Kebonsari,  
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nahdiyatul Muhimah  
NIM : 201105010019  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Prinsip Good Corporate Governance di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**NUR SEMESTA INDAH**

Kantor Pusat: Jl. Diponegoro No. 39, Kencong, Jember. Telp 0336 321348, faks. 0336 322435  
Kantor Cabang: Jl. Ahmad Yani No. 86, Jember. Telp./faks. 0331 411664

Nomor : 89/BPR/NSI/Jr/XI/2023

Jember, 28 November 2023

Lampiran : -

Perihal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwan Usman Nadhy

Jabatan : Pimpinan Cabang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nahdiyatul Muhimah

Universitas : Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiq - Jember

Jurusan/ Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Islam

NIM : 201105010019

Judul : "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance di BPR Nur Semesta Indah Cabang Jember"

Telah melaksanakan Penelitian di **PT BPR Nur Semesta Indah Cabang Jember** pada November 2023. ( 3 hari )

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Marwan Usman Nadhy, SE**  
Pimpinan Cabang

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Kamis/14 September 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian
2.	Rabu/20 September 2023	Diterima Penelitian
3.	Jumat/27 September 2023	Pra penelitian untuk pendahuluan dan menanyakan nama-nama karyawan yang hendak diwawancarai
4.	Jumat/03 November 2023	Wawancara dengan pimpinan dan karyawan
5.	Rabu/08 November 2023	Wawancara dengan karyawan
6.	Rabu/15 November 2023	Briefing dengan pimpinan terkait pertanyaan yang mau ditanyakan pada nasabah
7.	Kamis/16 November 2023	Wawancara dengan beberapa nasabah
8.	Jumat/28 November 2023	Mengambil surat selesai penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Mengetahui,

Pimpinan Cabang BPR Nur Semesta Indah

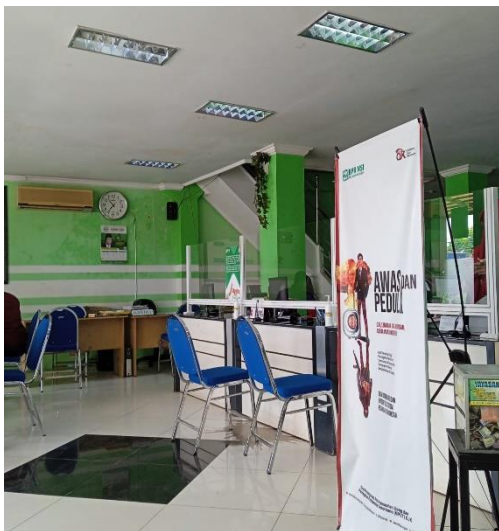


Marwan Usman Nadhy

**DOKUMENTASI**









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-28.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nahdiyatul Muhimah  
NIM : 201105010019  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Prinsip Good Corporate Governance di BPR Nur Semesta Indah Kantor Cabang Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 28 November 2023  
An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



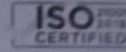
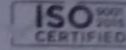
Syaiful Mulyadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [feb@uinkhas.ac.id](mailto:feb@uinkhas.ac.id) Website: <http://feb.uinkhas.ac.id>



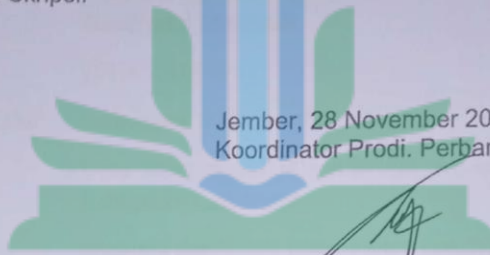
SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nahdiyatul Muhimah  
NIM : 201105010019  
Semester : 7

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 November 2023  
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Ana Pratiwi, SE., Ak., IMSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Nahdiyatul Muhimah  
Nim : 201105010019  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 06 September 2001  
Alamat Lengkap : Desa Wangen, RT 003 RW 001, Kecamatan Glagah,  
Kabupaten Lamongan  
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Riwayat Pendidikan : 1. TK Tarbiyatul Athfal  
2. MI Tarbiyatul Athfal  
3. MTS Bustanul Ulum  
4. MTS Terpadu Roudlotul Qurán  
5. MAN 1 Lamongan